



KEMKOMINFO

LAPORAN KINERJA 2019

**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN
KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



LAPORAN KINERJA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

2019



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat sehingga Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai Badan Litbang SDM) dalam melaksanakan pembangunan serta merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Litbang SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah pasca pembangunan infrastruktur. Berdasarkan arahan Presiden, setelah satu periode Indonesia fokus kepada infrastruktur, langkah selanjutnya adalah membangun SDM untuk memanfaatkan atau memaksimalkan infrastruktur yang telah dibangun. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi fokus Presiden untuk tahun 2019. Badan Litbang SDM dengan *core business* pengembangan SDM tentu turut mendukung instruksi tersebut. Hal ini dapat terlihat pada Sasaran Program Badan Litbang SDM Tahun 2019 dimana terdapat 1 (satu) Sasaran Program yang terdiri atas 3 (tiga) Indikator yang mendukung pengembangan SDM.

Laporan Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang capaian Badan Litbang SDM selama tahun anggaran 2019 serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Sangat kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dalam menggambarkan akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun melalui Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mendorong pembangunan bidang komunikasi dan informatika khususnya menumbuh kembangkan budaya riset dan akselerasi pengembangan sumber daya manusia Indonesia serta menggambarkan kinerja dan kinerja tambahan yang kami hasilkan.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung Badan Litbang SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terjalin dengan baik di waktu-waktu selanjutnya.

Jakarta, Februari 2020
Kepala Badan Litbang SDM


Basuki Yusuf Iskandar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	2
TUGAS DAN FUNGSI	3
SUMBER DAYA MANUSIA	9
PERENCANAAN KINERJA	11
SASARAN PROGRAM	12
INDIKATOR KINERJA	14
PERJANJIAN KINERJA	15
AKUNTABILITAS KINERJA	21
CAPAIAN KINERJA	22
SP1. Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	23
SP2. Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	31
SP3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM	42
REALISASI ANGGARAN	47
PENUTUP	53
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo	5
Tabel 1.2	Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo	6
Tabel 2.1	PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2019	16
Tabel 2.2	PERJANJIAN KINERJA BADAN LITBANG SDM TAHUN 2019/25	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Badan Litbang SDM	22
Tabel 3.2	IKSP 1.1. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	23
Tabel 3.3	Skema Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship 2019	24
Tabel 3.4	Rekap Capaian Peserta Program Digital Talent Scholarship 2019	25
Tabel 3.5	IKSP 1.2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI	28
Tabel 3.6	Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI 2015-2019	29
Tabel 3.7	IKSP 1.3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	29
Tabel 3.8	Rincian Realisasi Kelulusan Peserta Diklat	30
Tabel 3.9	IKSP 2.1. Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan	31
Tabel 3.10	<i>Feedback</i> Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2019	41
Tabel 3.11	IKSP 3.1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	42
Tabel 3.12	IKSP 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	42
Tabel 3.13	IKSP 3.3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018	43
Tabel 3.14	IKSP 3. .4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM	43
Tabel 3.15	IKSP 3.5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM	44
Tabel 3.16	Rincian Anggaran DIPA Petikan di lingkungan Badan Litbang SDM	48
Tabel 3.17	Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Berdasarkan Jenis Belanja	49
Tabel 3.18	Kinerja Keuangan Badan Litbang SDM	50
Tabel 3.19	Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2015 s.d 2019	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Litbang SDM Pusat berdasarkan Permen Kominfo No 6 Tahun 2018	
Gambar 1.2	Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo	4
Gambar 1.3	Struktur Organisasi UPT BPSDMP Kominfo	5
Gambar 1.4	Struktur Organisasi STMM Yogyakarta	6
Gambar 1.5	Struktur Organisasi UPT BPPTIK	7
Gambar 1.6	Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM	8
Gambar 2.1	Cascading Sasaran Program Badan Litbang SDM	10
Gambar 2.2	Cascading Indikator Kinerja Badan Litbang SDM	12
Gambar 3.1	Target dan Realisasi Peserta DTS 2019	14
Gambar 3.2	Prosentase Capaian Realisasi Peserta dan Kelulusan Peserta DTS 2019	25
Gambar 3.3	Penyerapan Alumni VSGA	26
Gambar 3.4	Penyerapan Alumni FGA	27
Gambar 3.5	Tingkat Kelulusan Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	27
Gambar 3.6	Realisasi Per Belanja Badan Litbang SDM	30
Gambar 3.7	Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2015 s.d 2019	49
		51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2019

57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Badan Litbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika di akhir tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Litbang SDM dalam melaksanakan misinya. untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Pada tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan SDM telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Dari 9 (Sembilan) IKSP yang telah ditetapkan. sebanyak 7 (tujuh) IKSP atau sekitar 77% IKSP yang pencapaiannya melebihi target (>100%). Sementara 2 (dua) IKSP atau sekitar 22% IKSP belum mencapai target (<100%).

2. 7 (tujuh) IKSP yang pencapaiannya melebihi target dari yang ditetapkan (>100%) adalah :
 - 1) Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI;
 - 2) Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis;
 - 3) Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan;
 - 4) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM;
 - 5) Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM;
 - 6) Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018; dan
 - 7) Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM
3. 2 (dua) IKSP yang pencapaiannya belum mencapai target (<100%) adalah:
 - 1) Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri;
 - 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi Badan Litbang SDM pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 354.473.239.980,- atau 91,95% dari alokasi anggaran Rp. 385.488.751.000.

Dalam rangka terus mendorong terwujudnya kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, Badan Litbang SDM berusaha mengatasi dan mencari solusi atas kendala dan hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholder Badan Litbang SDM dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Badan Litbang SDM.



PENDAHULUAN





LATAR BELAKANG

Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak pengaruh dan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi saat ini mendorong pesatnya laju penetrasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Pembangunan infrastruktur memang erat kaitannya dengan jumlah pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat kini mulai menjadikan informasi sebagai suatu komoditi yang berharga. Bagaimanapun juga disadari atau tidak masyarakat informasi yang tengah digadang-gadang saat ini tidak dapat lepas dari komponen dinamika teknologi informasi. Teknologi informasi memang telah terbukti berpengaruh terhadap perubahan masyarakat di era ini. Perkembangannya yang pesat saat ini telah mendorong peran strategis informasi sebagai sebuah modal dasar pembangunan. Inilah yang menjadi salah satu kunci bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Suatu upaya untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan tersebut dapat mensejajarkan bangsa Indonesia menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang telah maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negaranya masing-masing.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai institusi pemerintah yang diberi tugas dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pembangunan komunikasi, informasi dan media massa, termasuk telematika dan penyiaran dalam hal ini menyadari dan mendukung upaya pemerintah terhadap terwujudnya masyarakat informasi berbasis ilmu pengetahuan atau dikenal sebagai *Knowledge Base Society*. Pada pelaksanaannya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program dan kegiatan terkait dengan satuan kerja yang dinaunginya.

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan unsur penunjang dengan perannya sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, serta sebagai pelaksana pengembangan SDM pada bidang yang sama. Melalui peran inilah, usulan terkait kebijakan maupun regulasi hingga pada evaluasi atas implementasi dari kebijakan tersebut dapat direkomendasikan pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menjalankan peran lainnya, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM juga melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi untuk bidang komunikasi dan informatika. Sebagaimana peran yang dimaksud berupaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta pemahaman masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika. Peningkatan literasi, pengetahuan, dan kompetensi masyarakat terkait bidang komunikasi dan informatika bagaimanapun sejalan dengan arah perkembangan masyarakat dalam era informasi saat ini.

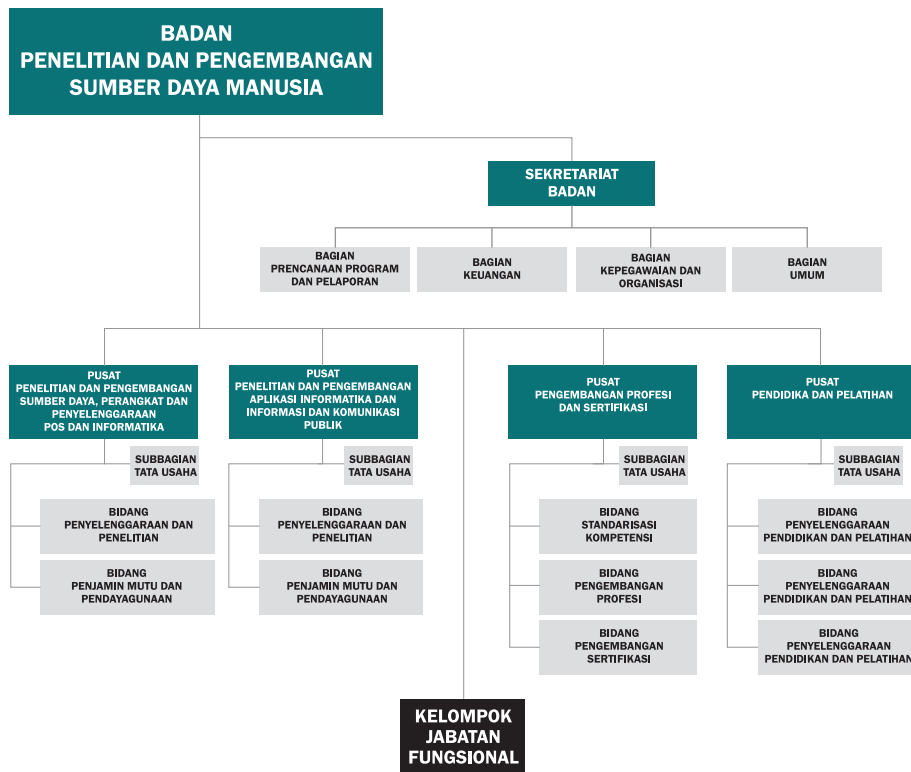
TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Badan Litbang SDM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Litbang SDM menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Litbang SDM Pusat Berdasarkan Permen Kominfo No 6 Tahun 2018



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Litbang SDM juga didukung oleh UPT di daerah yang ditetapkan dalam beberapa Peraturan Kementerian komunikasi dan Informatika, yaitu :

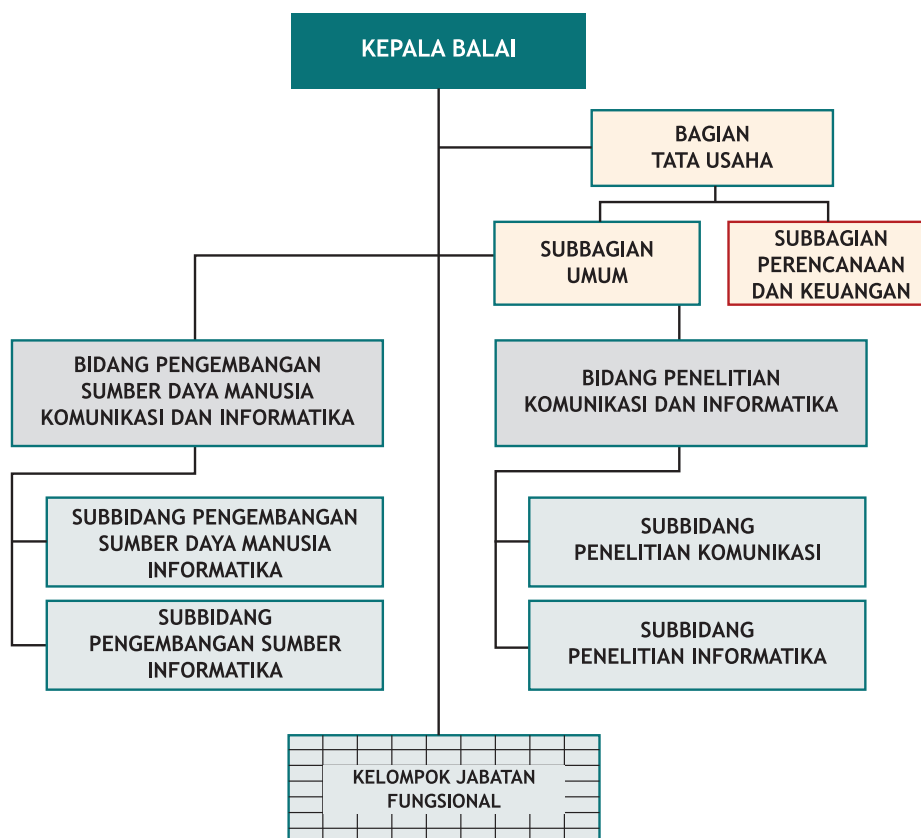
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BBPSDMP dan BPSDMP

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo) Medan dan Makassar yang dipimpin oleh Kepala BBPSDMP kominfo, memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan. Susunan organisasi BBPSDMP Kominfo Medan terdiri dari : Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel. 1.1 Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA
1.	BBPSDMP Kominfo Medan	1. Aceh
		2. Sumatera Utara
		3. Sumatera Barat
		4. Riau
		5. Kepulauan Riau
		6. Kalimantan Barat
		7. Kalimantan Utara
2.	BBPSDMP Kominfo Makassar	1. Sulawesi Selatan
		2. Sulawesi Tenggara
		3. Nusa Tenggara Timur
		4. Maluku
		5. Maluku Utara
		6. Papua
		7. Papua Barat

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo

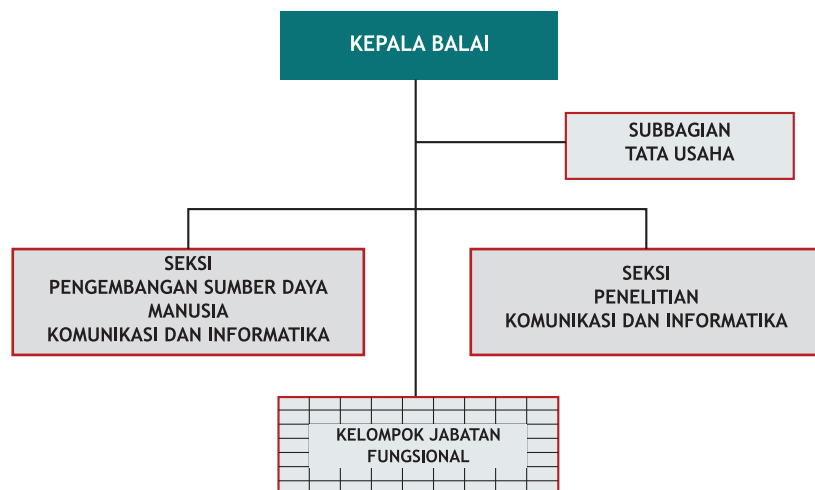


Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP kominfo) yang dipimpin oleh Kepala BPSDMP Kominfo. memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja. Susunan organisasi BPSDMP Kominfo terdiri dari : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Seksi Penelitian Komunikasi dan Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel. 1.2 Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA
1.	BBPSDMP Kominfo Jakarta	1. DKI Jakarta 2. Sumatera Selatan 3. Bangka Belitung 4. Jambi
2.	BPSDMP Kominfo Bandung	1. Jabar 2. Banten 3. Lampung 4. Bengkulu
3.	BPSDMP Kominfo Surabaya	1. Jawa Timur 2. NTB
4.	BPSDMP Kominfo Yogyakarta	1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Bali
5.	BPSDMP Kominfo Banjarmasin	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur
6.	BPSDMP Kominfo Manado	1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo 4. Sulawesi Barat

Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo



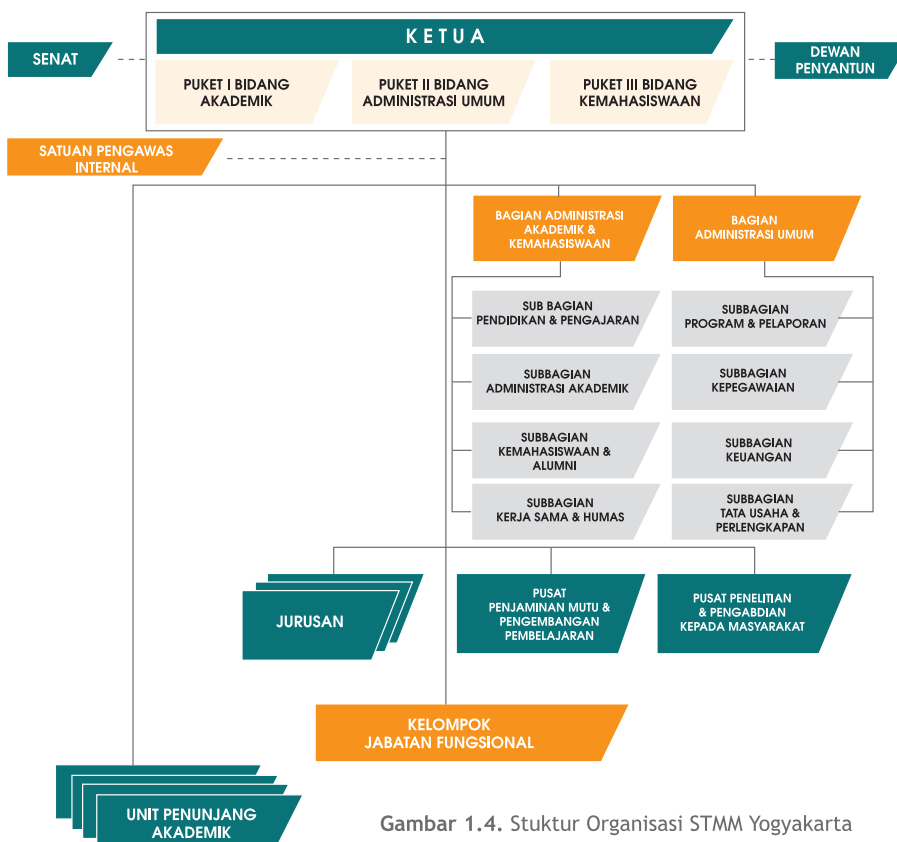
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media, maka dalam melaksanakan Peraturan Presiden tersebut diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Permen Kominfo nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) yang dipimpin oleh Ketua STMM (setingkat Eselon II) dan memiliki tugas menyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan infomatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi STMM terdiri dari: Ketua, Pembantu Ketua, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Pengawas Intenal, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Administrasi Umum, Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penunjang Akademik dan Kelompok Jabatan fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

(Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nomor 29 Tahun 2014)



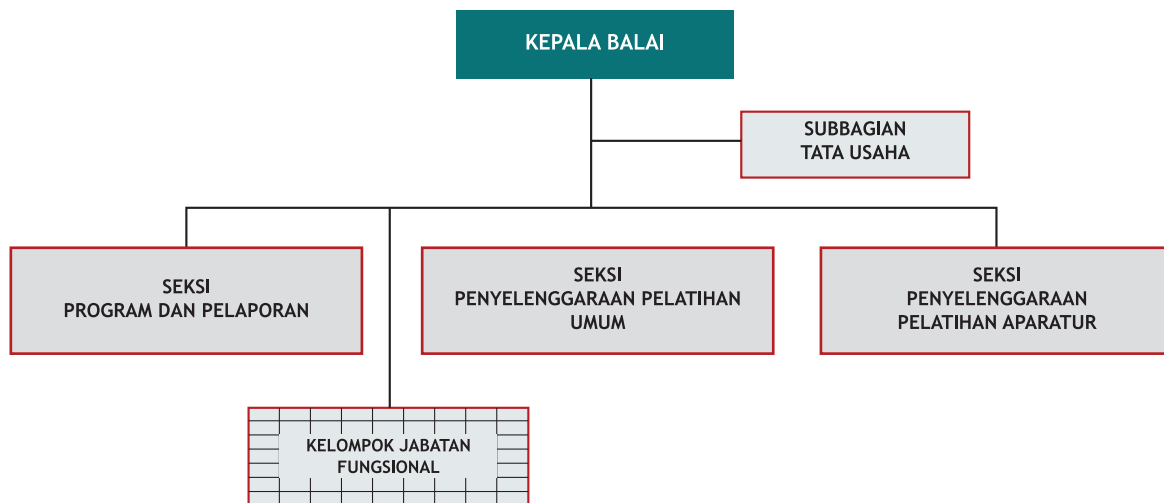
Gambar 1.4. Stuktur Organisasi STMM Yogyakarta

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPTIK.

Berdasarkan Permen Kominfo nomor 4 Tahun 2018 Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) sebagai salah satu UPT dilindungi Badan Litbang SDM yang dipimpin oleh Kepala BPTIK, memiliki tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BPPTIK juga memiliki tugas melaksanakan pelatihan (*vocational training*), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 2668/M.PAN/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan menyelenggarakan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Bidang TIK. Susunan organisasi BPPTIK terdiri dari: Subbagian Tata Usaha, Sesi Program dan Pelaporan, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Umum, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.5
Struktur Organisasi UPT BPPTIK



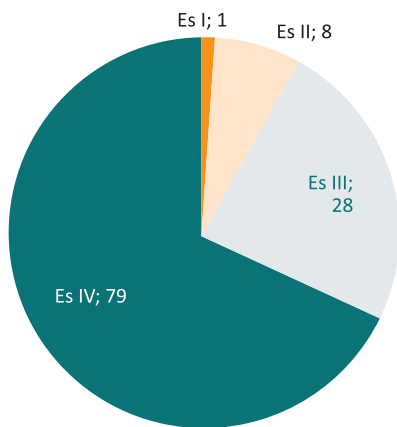
SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LITBANG SDM



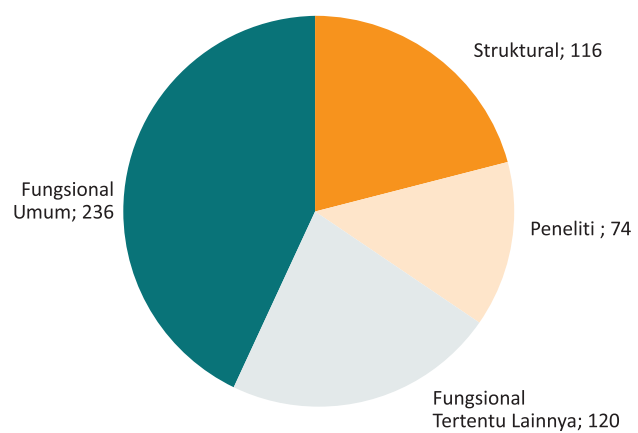
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Litbang SDM didukung oleh 546 pegawai dari 15 (lima belas) Satuan Kerja baik di lingkungan Pusat maupun daerah dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar 1.6
Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM

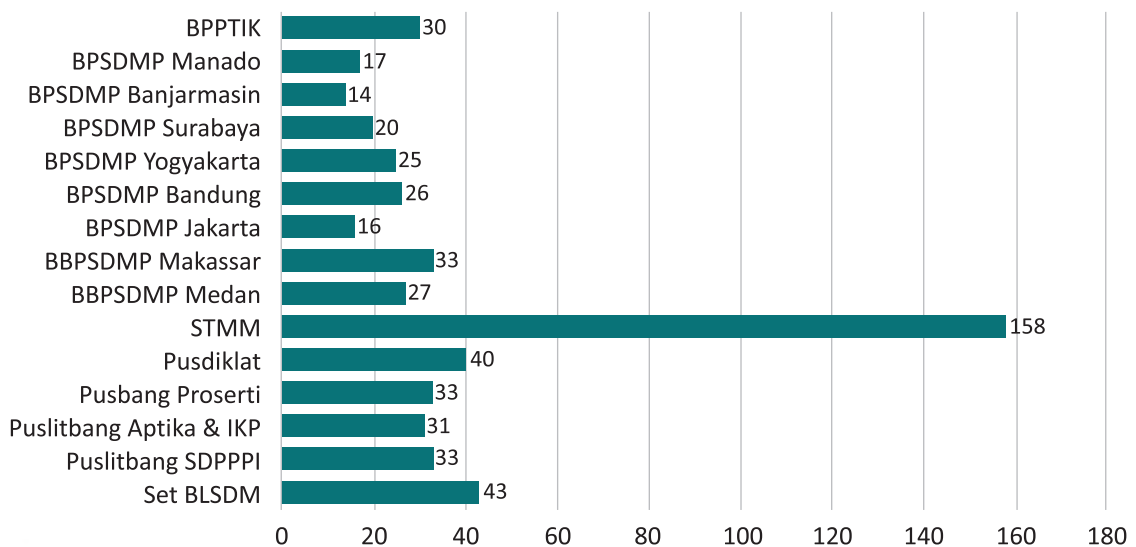
PEJABAT STRUKTURAL



BERDASARKAN JABATAN



JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN SATUAN KERJA



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, mengacu pada RPJM Nasional tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- SS.1** Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
- SS.2** Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
- SS.3** Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif



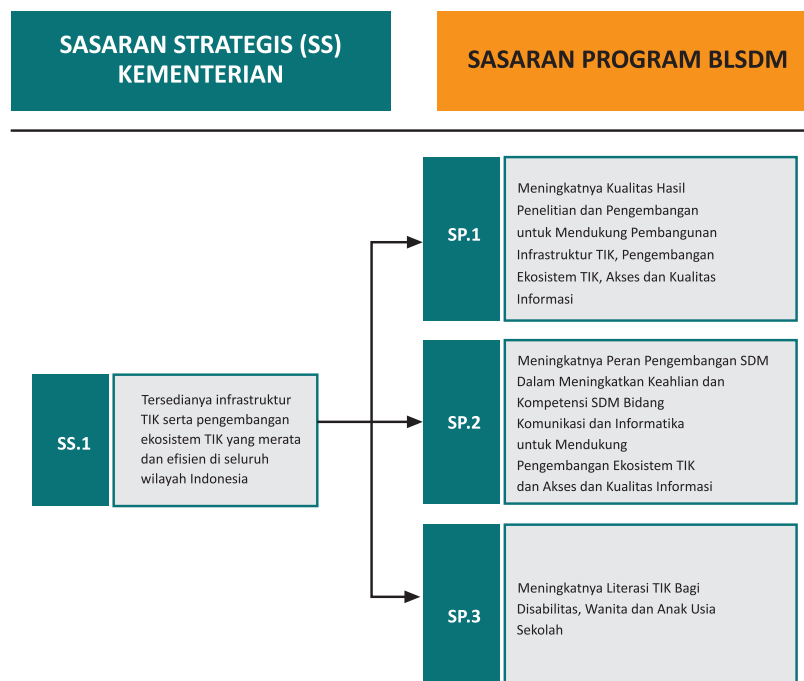


SASARAN PROGRAM

Dalam mendukung 3 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut diatas. Badan Litbang SDM menetapkan 3 tiga Sasaran Program sebagai berikut:

- SP.1** Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan
- SP.2** Meningkatnya peran pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
- SP.3** Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita, dan anak usia sekolah

Gambar 2.1
Cascading Sasaran Program Badan Litbang SDM berdasarkan Renstra 2015-2019



Arah Kebijakan Badan Litbang SDM Tahun 2015-2019

Dalam mencapai sasaran program diatas maka disusun arah dan kebijakan Badan Litbang SDM terkait penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan Informatika, arah dan kebijakan Badan Litbang SDM tahun 2015-2019 adalah:

1. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Azas manfaat publik. bahwa penelitian Badan Litbang SDM harus berorientasi pada: (1) Hasil penelitian menjadi dasar/acuan dalam pengambilan keputusan/kebijakan; (2) Hasil penelitian mejadi dasar/acuan dalam mengevaluasi kebijakan/program bidang kominfo.
 - b. Antisipatif, penelitian Badan Litbang SDM harus dapat mengantisipasi kebutuhan kebijakan di masa mendatang.
 - c. “Alert” (*early warning*), penelitian Badan Litbang SDM memberikan prediksi peta permasalahan dan solusi dari perkembangan TIK.
 - d. Tertib kaidah dan etika, penelitian Badan Litbang SDM harus sesuai kaidah dan etika penelitian.

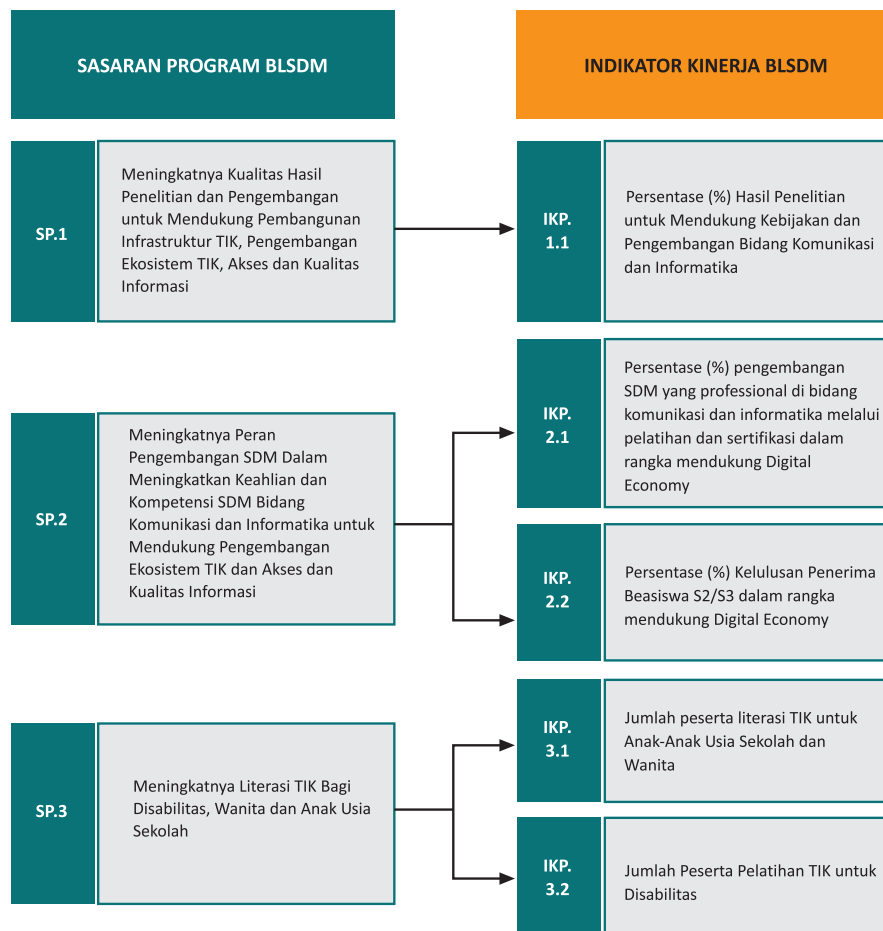
Jenis peneltian dan pengembangan yang dilaksanakanoleh Badan Litbang SDM adalah : (1) *Proactive analysis*, untuk memetakan dan mengidentifikasi *policy instrument* terhadap *upcoming technology*, (2) *Policy-impact analysis*. untuk memungkinkan deteksi awal terhadap dampak suatu kebijakan.

2. Pengembangan SDM
 - a. Peningkatan kapasitas SDM
 - Peningkatan literasi, edukasi, kompetensi dan keahlian masyarakat Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 melalui peningkatan peran serta Institusi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui program pendidikan tanpa gelar serta mempersiapkan tenaga kerja bidang kominfo agar dapat diserap industry TIK nasional.
 - Intensifikasi pelaksanaan sertifikasi angkatan kerja Indonesia berbasis SKKNI dan fasilitasi penetrasi pasar tenaga kerja formal Indonesia bidang kominfo untuk memasuki pasar ASEAN;
 - Penyusunan SKKNI yang mendorong SDM yang berdaya saing;
 - Fasilitasi pembentukan LSP, prioritas kompetensi dan penyusunan SKKNI dan KKNi berdasarkan roadmap pengembangan SDM dan monitoring implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI bidang Kominfo;
 - Revitalisasi model penyelenggaraan beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri bidang komunikasi dan informatika;
 - Revitalisasi kurikulum dan sasaran sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK bagi aparatur pemerintah;
 - Penguatan peran STMM menuju *industrial-based world class university*
 - Peningkatan *social readiness* dan *awareness* masyarakat terhadap potensi TIK terutama bagi *ICT early adopter* (anak-anak, disabilitas, dan ibu rumah tangga).
 - b. Peningkatan produktivitas SDM
 - Mendorong tumbuhnya ekosistem inovasi yang sehat, misal berperan sebagai *talent pool* sekaligus mediator ke industri;
 - Membangun dan mengelola “*innovation center*”.

INDIKATOR KERJA

Berdasarkan Sasaran Program tersebut diatas dirumuskan indikator kinerja utama seperti di bawah ini:

Gambar 2.2 Cascading Indikator Kinerja Badan Libang SDM





PERJANJIAN KINERJA

Untuk menjalankan Rencana Strategis, Kementerian menyusun Perjanjian Kinerja yang bersifat tahunan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis 5 Tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MENTERI	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	Layanan Seluler: 90% (75.752 Desa dari Total 83.218 Desa)
		Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan <i>Fixed Broadband</i>	Layanan <i>Fixed Broadband</i> : 12,42% Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200 Rumah Tangga)
		Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Backbone</i>)	Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Backbone</i>): 100% (<i>Komitmen PT. Telkom: 457 Ibukota Kab/Kota + Palapa Ring: 57 Ibukota Kab/Kota</i>)
2.	Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional	Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	a. U M K M <i>Go Online</i> : 100% (250.000 UMKM) b. Petani & Nelayan <i>Go Online</i> : 100% (260.165 Petani dan Nelayan Go Online)
		Persentase (%) Pengembangan <i>Digital Talent</i> di Indonesia	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (416 Startup Digital) b. <i>Digital Talent Scholarship</i> : 20% Peserta dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri
3.	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥ 70%
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo	≥ 76
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo	≥ 67
		3. Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP
		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	≥ 94

Apabila diturunkan dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, maka Badan Litbang SDM mendukung Sasaran Strategis 2, “*Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional*” dengan Indikator Kinerja Menteri 2.2., “*Persentase (%) Pengembangan Digital Talent di Indonesia*” dengan target Tahun Anggaran 2019: *Digital Talent Scholarship: 20% Peserta dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.*

Perjanjian kinerja Tahun 2019 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji kinerja Badan Litbang SDM yang jelas dan terukur selama tahun 2019 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2019 merupakan implementasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Kementerian.

Tujuan perjanjian kinerja ini adalah untuk menjadi tolak ukur kinerja Badan Litbang SDM sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan serta sanksi atau *punishment*.

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2019 memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20%
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI	70%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%
2.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan	60%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	≥ 76
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	≥ 67

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018	≤ 1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM	a. Thn. Berjalan: 80% b. Thn. Sebelumnya: 40%
		5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM	≥ 94

Untuk mencapai target kinerja Badan Litbang SDM tahun 2019, rencana kerja dilakukan melalui 9 (Sembilan) program/kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri

Jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan tinggi bermunculan, sementara jenis pekerjaan repetitif dan administratif mengalami penurunan yang signifikan. Banyak juga jenis pekerjaan lama yang bertahan, namun menuntut keterampilan yang kekinian. Ahli-ahli teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan semakin banyak dicari seiring dengan masifnya digitalisasi. Akibatnya, timbul kesenjangan yang besar dalam hal *supply* dan *demand* talenta digital yang saat ini terjadi hampir di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah sejak tahun 2019 menjadikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas nasional. Program Digital Talent Scholarship merupakan program pengembangan SDM bidang TIK yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Target grup utama program ini adalah alumni SMK dan perguruan tinggi yang belum bekerja atau siswa dan mahasiswa yang segera lulus. Tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan calon tenaga kerja bidang TIK yang lebih siap dan lebih sesuai dengan kebutuhan industri sehingga dapat mempersingkat masa tunggu mereka untuk memasuki dunia kerja.

2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi angkatan kerja muda di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada angkatan kerja muda dan memfasilitasi uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra dan dibuktikan melalui Sertifikat kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 70 ayat 1 dan 2, bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan Kompetensi. Pengembangan Kompetensi tersebut melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Kursus dan Penataran. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Diklat yang mengarah kepada upaya peningkatan:

- a. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air.
- b. Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya.
- c. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja organisasinya.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk peningkatan kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang manajerial, teknis, dan fungsional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan membandingkan peserta yang lulus diklat dengan jumlah realisasi peserta.

4. Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM diharapkan dapat memberikan dukungan dan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya kajian/penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan penelitian jangka panjang, penelitian jangka pendek dan *policy brief*.

5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM

Implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Litbang SDM diantaranya melalui pengawasan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Litbang SDM.

Tujuan kegiatan ini adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Badan Litbang SDM.

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM

Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM melalui penjaminan kualitas dan penilaian mandiri atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Litbang SDM.

Tujuan kegiatan ini adalah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan konsep *good governance*.

7. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018

Melihat temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 kemudian dibandingkan total realisasi anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk sebagai alat kontrol untuk memantau prosentase temuan terhadap total nilai anggaran. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi patokan seberapa besar kepatuhan, kepatutan, dan ketaatan administrasi yang diterapkan di lingkungan Badan Litbang SDM.

8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM

Penyelesaian terhadap tindak lanjut rekomendasi di Badan Litbang SDM dari hasil pengawasan BPK dan Inspektorat di tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai alat kontrol untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPK dan Inspektorat baik di tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

9. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) yang tercantum pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjamin ketercapaian keluaran/output (*output delivery*) kelancaran pelaksanaan anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM), mendukung manajemen kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D), dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja).

AKUNTABILITAS KINERJA



CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Litbang SDM

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20%	19,05%	95%
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI	70%	82%	117%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%	99%	110%
2.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan	60%	100%	166%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	≥76	90.5	119%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	≥67	73.73	110%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018	≤1%	0.08	198,80%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM	a. Thn. Berjalan: 80% b.Thn. Sebelumnya: 40%	a. Thn. Berjalan: 100% b. Thn. Sebelumnya: 100%	100%
		5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM	≥94	93,59	99%

SP.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Badan Litbang SDM memiliki beberapa indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

IKSP 1.1. Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* (DTS) dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri

Tabel 3.2.
IKSK 1.1. Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri

SP.1 Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika			
Indikator	Target	Capaian	%
1. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS) dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20 %	19,05 %	95 %

Sebagai gambaran umum, Program DTS tahun 2019 terbagi menjadi 4 (empat) akademi serta mitra kerja sama yang jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan Program DTS tahun 2018. Pada tahun 2019, BLSDM berhasil menyelesaikan dokumen kerja sama (MoU dan PKS) dengan mitra Perguruan Tinggi (Universitas/ Politeknik) Negeri maupun Swasta sejumlah 54 PT dan tahun 2020 sejumlah 89 PT serta PKS untuk program pasca pelatihan. Pelaksanaan program ini juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi global untuk penyusunan dan penyediaan kurikulum, modul (materi ajar), platform serta instruktur untuk pelaksanaan *Training of Trainer* (TOT) bagi calon pengajar.

Akademi pelatihan DTS 2019 adalah sebagai berikut:

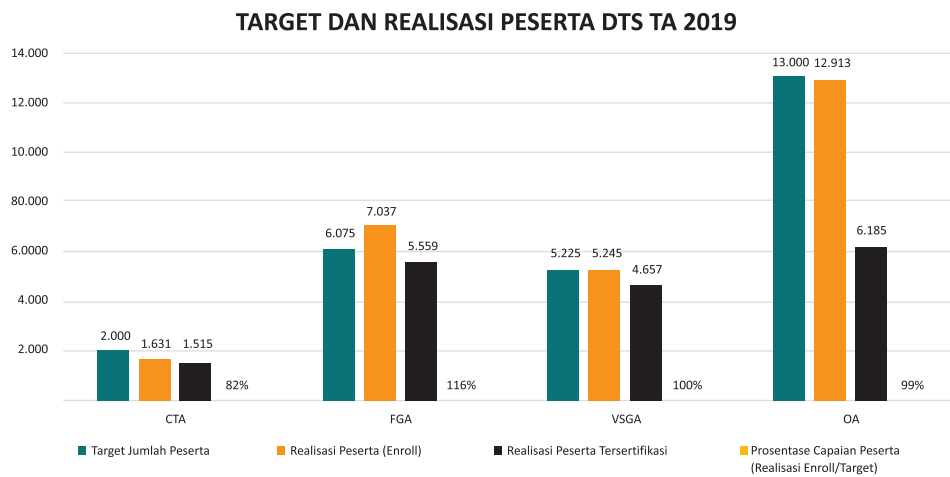
- Fresh Graduate Academy (FGA)
- Vocational School Graduate Academy (VSGA)
- Coding Teacher Academy (CTA)
- Online Academy (OA)

Tabel 3.3
 Skema Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship 2019

No.	Academy	Penyelenggara	Mitra & Tema Pelatihan	Kuota	Sasaran Peserta	Jam Pelajaran	Keterangan
1.	Fresh Graduate Academy	Universitas Negeri dan Swasta	1. CISCO (Cybersecurity) 2. AWS (IoT, Machine Learning, AI, Cloud Computing, Big Data)	1050 5025 TOTAL 6.075	Lulusan Pendidikan Tingkat D3/D4/S1 yang terkait dalam bidang TIK dan MIPA	2 Bulan (144 JP)	Add on Digipreneur 70JP & PSD 16JP
2.	Vocational School Graduate Academy	Politeknik Negeri BPRTIK, Pusklat, BPPTIK, STMM Online Course	1. SKKNI (Junior Network Adm) 2. SKKNI (Junior Web Developer) 3. SKKNI (Junior Mobile Programmer) 4. SKKNI (Junior Graphic Designer) 5. SKKNI (Intermediate Animator)	1.250 950 1.525 700 800 TOTAL 5.225	Lulusan SMK semua jurusan	1 Bulan (72 JP)	Add on Digipreneur 70JP & PSD 16JP
3.	Coding Teacher Academy		Cisco (Programming Essentials in Python)	2000	Guru SMK/SMA/MA yang mengajar di bidang TIK (Terbuka bagi Guru PNS dan Non-PNS)	5 Hari Kerja Offline dan Online	
4.	Online Academy		1. Cisco (CCNA Cybersecurity Operations) 2. Cisco (CCNA Security) 3. Cisco (Programming Essentials in Python) 4. Cisco (IT Essentials) 5. Microsoft (Artificial Intelligence) 6. Microsoft (Cybersecurity) 7. Microsoft (Internet of Things) 8. Microsoft (Data Analysis) 9. Microsoft (Data Science) 10. LAN & Microsoft (Digital Policy) 11. AWS (Artificial Intelligence) 12. AWS (Big Data) 13. Google (Associate Cloud Engineer) 14. Google (Android)	750 750 1500 2000 300 300 300 300 300 1500 1000 2000 1000 1000 TOTAL 13.000	Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum ASN PKN PIM II Umum Umum Umum Umum	70 JP	1. Khusus Associate Cloud Engineer perlu ToT 2. Digipreneur merupakan add on FGA dan VSGA diampu oleh OA jumlah peserta 11.225 (70JP)* 3. PSD/Professional Skills Development: pelatihan soft skill untuk VSGA, FGA, OA. Program pasca pelatihan diampu oleh Pokja Pasca Pelatihan dan OA
TOTAL Kuota Peserta				26.300			

Dari target tersebut, capaian jumlah peserta pada beberapa akademi melampaui target. Berikut grafik target dan capaian tiap akademi:

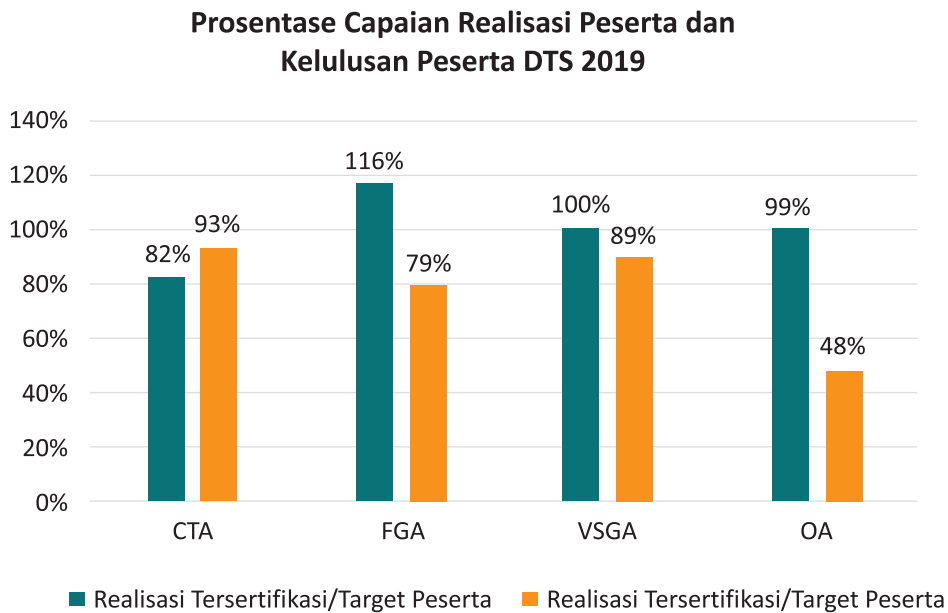
Gambar 3.1
Target dan Realisasi Peserta DTS 2019



Tabel 3.4
Rekap Capaian Peserta Program Digital Talent Scholarship 2019

	Fresh Graduate Academy (FGA)	Vocational School Graduate Academy (VSGA)	Coding Teacher Academy (CTA)	Online Academy (OA)	TOTAL
Kuota Beasiswa	6.075	5.225	2.000	13.000	26.300
Jumlah Pendaftar	12.210	8.977	2.033	26.358	49.578
Peserta Diterima	7.490	6.117	1.817	15.720	31.144
Jumlah Peserta	7.037	5.245	1.631	12.913	26.826
Peserta Lulus	5.559	4.657	1.515	6.185	17.916

Gambar 3.2
 Prosentase Capaian Realisasi Peserta dan Kelulusan Peserta DTS 2019



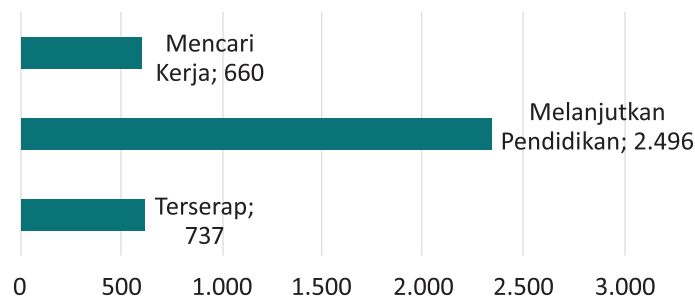
Dari data di atas, peserta DTS tersertifikasi pada akademi FGA adalah sebanyak 5.559 dan peserta DTS tersertifikasi akademi VSGA adalah sebanyak 4.657 orang. Namun, identifikasi data peserta terserap dari alumni kedua akademi tersebut mengalami kendala. Dari jumlah di atas, tidak seluruh peserta merespon kuesioner untuk menemukan kelulusan kedua akademi tersebut yang terserap industri.

Hingga Desember 2019, hasil survei menunjukkan 7.289 alumni memberikan *feedback* (3.396 alumni FGA dan 3.893 alumni VSGA). Pertanyaan kuesioner diarahkan untuk mengidentifikasi alumni yang berstatus bekerja, mencari pekerjaan, magang, kuliah, *freelance*, lanjut pelatihan, dan wirausaha. Alumni yang masuk kategori terserap industri adalah alumni yang bekerja, magang, *freelance*, dan wirausaha. Sementara alumni yang masuk kategori melanjutkan pendidikan adalah alumni yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi (formal) atau pelatihan (pendidikan informal).

Sebanyak 1.210 alumni FGA dari total 5.559 peserta FGA tersertifikasi (21%) dan 737 alumni VSGA dari total 4.657 peserta VSGA tersertifikasi diserap industri (16%). **Sehingga capaian total alumni FGA dan VSGA tersertifikasi yang diserap industri adalah sebanyak 1.947 dari 10.216 total peserta FGA dan VSGA tersertifikasi dengan prosentase 19,05%.** Dengan target awal yang ditetapkan sebesar 20%, maka Badan Litbang SDM mampu meraih performa sekitar 95%.

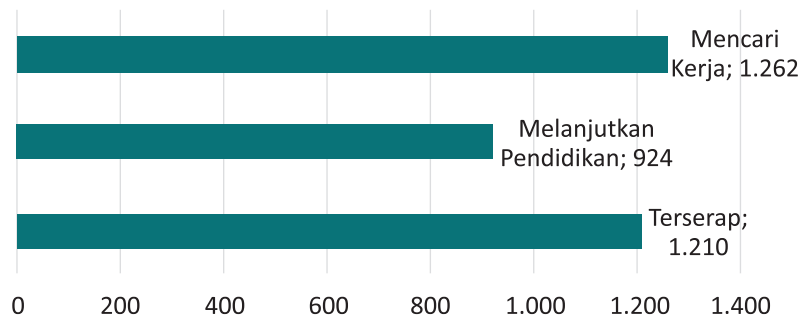
Gambar 3.3 Penyerapan Alumni VSGA

Penyerapan Alumni VSGA



Gambar 3.4 Penyerapan Alumni FGA

Penyerapan Alumni FGA



Sumber dana program *Digital Talent Scholarship* Tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Komunikasi sebesar Rp. 109.364.533.000 dengan realisasi sebesar Rp 91.745.442.572 atau sekitar 83,89% dari total pagu.

Dalam pelaksanaan program DTS 2019, masih terdapat kendala-kendala yang diidentifikasi menyebabkan belum optimalnya program ini antara lain:

- Latar belakang pendidikan peserta pada setiap skema pelatihan masih heterogen.
- Kesulitan mencari akomodasi dengan harga terjangkau bagi peserta luar kota sehingga menurunkan minat peserta menyelesaikan sampai akhir pelatihan.
- Waktu pelatihan yang masih dirasa terlalu ketat untuk materi pelatihan yang disampaikan.
- Adanya ketidaksesuaian antara materi ujian dengan materi pelatihan.

Dari kendala yang terjadi pada pelaksanaan tahun 2019, untuk pelaksanaan selanjutnya kami memandang perlunya dilakukan *review* dan *update* terhadap beberapa materi dalam silabus terutama terkait dengan pembaharuan teknologi serta teknik dengan yang dibutuhkan di dunia industri.

IKSP 1.2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI

Tabel 3.5
IKSK 1.2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI

SP.1 Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika			
Indikator	Target	Capaian	%
2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI	70 %	82 %	117 %

Salah satu agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan yang strategis juga menjadi kebijakan pasar tenaga kerja tahun 2025. Untuk mempersiapkan hal tersebut, peningkatan jumlah tenaga terampil untuk menghadapi keterbukaan pasar merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Pengembangan SDM Nasional bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa telah diupayakan Kementerian Kominfo sejak didirikan pada tahun 2005. diantaranya melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 14 yang menyatakan tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi profesi dalam sistem pelatihan kerja nasional. Berdasarkan PP tersebut, Kementerian Kominfo bertugas sebagai instansi pembina teknis standarisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana kompetensi SDM dilakukan melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra dan dibuktikan melalui Sertifikat kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pada tahun 2019, sebanyak 10.121 peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika dinyatakan kompeten dari total 12.309 jumlah peserta sertifikasi SKKNI (termasuk di dalamnya peserta DTS skema VSGA) maka sebanyak **82% Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI**. Dengan target awal yang ditetapkan sebesar 70%, maka performa Badan Litbang SDM 12 poin lebih tinggi daripada target semula, yakni sebesar 117%.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari capaian satuan kerja dan UPT penyelenggara sertifikasi SKKNI yakni Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, STMM Yogyakarta, BBPSDMP Kominfo Medan, BBPSDMP Kominfo Makassar, BPSDMP Kominfo Jakarta, BPSDMP Kominfo Bandung, BPSDMP Kominfo Yogyakarta, BPSDMP Kominfo Surabaya, BPSDMP Kominfo Banjarmasin, BPSDMP Kominfo Manado, BPPTIK Cikarang dan BPRTIK Ciputat.

Berikut gambaran capaian pengembangan SDM yang profesional di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan dan sertifikasi dalam rangka mendukung *digital economy* dari tahun ke tahun :

Tabel 3.6

Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI 2015-2019

Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2

Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	7.575 orang	70% (dari 1600 peserta)	70% (dari 10.650 peserta)	70% (dari 6.000 peserta)	70% (dari 12.000 peserta)
Realisasi	63,53% (7.488 kompeten dari 11.785 peserta)	76,9% (1.398 kompeten dari 1.817 peserta)	81,58% (9.407 kompeten dari 11.531 peserta)	81,05% (5.129 kompeten dari 6.328 peserta)	82% (10.121 kompeten dari 12.309 peserta)
Pagu Anggaran (dalam Rp.)	65.064.646.000	6.368.305.000	46.401.512.000	31.858.972.707	60.274.303.000
Realisasi Anggaran (dalam Rp.)	55.490.454.263	6.354.476.468	45.436.286.097	30.440.171.510	57.656.729.983

Sumber dana program Pelatihan SKKNI (pelatihan vokasi) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Komunikasi sebesar Rp. 60.274.303.000 dengan realisasi sebesar Rp 57.656.729.983 atau sekitar 95,66% dari total pagu.

IKSP 1.3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

Tabel 3.7

IKSK 1.3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

SP.1 Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika				
	Indikator	Target	Capaian	%
3.	Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90 %	99 %	110 %

Pada Tahun 2018 indikator sasaran kegiatan peningkatan kompetensi adalah jumlah peserta yang mengikuti diklat, namun pada 2019 indikator Sasaran Program berubah menjadi persentase kelulusan peserta diklat. Dengan perubahan indikator tersebut berdampak pada proses penyelenggaraan diklat, yang berorientasi pada hasil bukan pada level output saja. Untuk mencapai indikator tersebut Pusdiklat berupaya meningkatkan mutu/kualitas pesertanya dengan memberikan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang bermutu, pengajar yang

berkompeten, dan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar Metode pengukurannya adalah dengan membandingkan peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta. Jumlah peserta yang mengikuti diklat manajerial, teknis, dan fungsional berjumlah 640 orang. Namun tidak semua jenis diklat menyertakan ujian untuk menentukan kelulusan/kompetensi peserta diklat. Terdapat juga diklat yang bersifat *completion*.

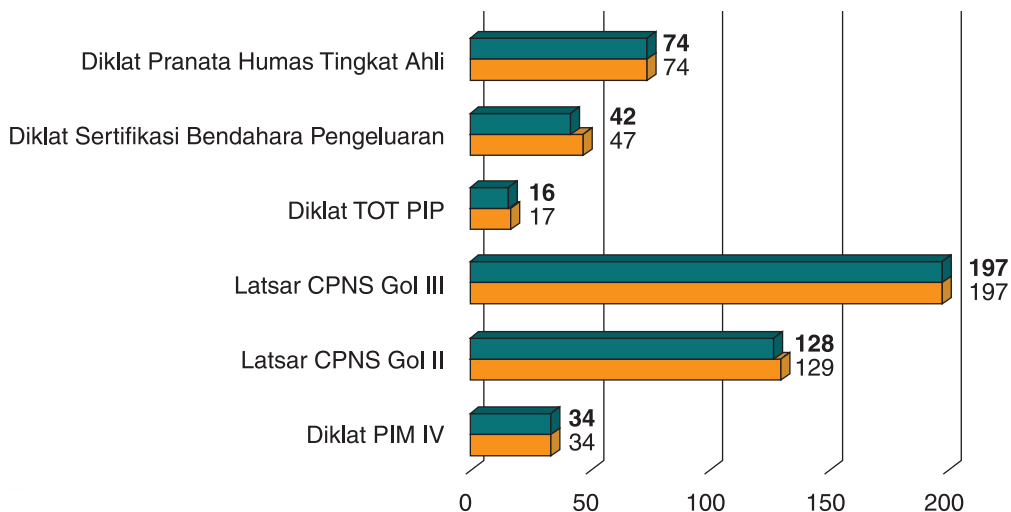
Diklat yang mengharuskan ujian untuk mengetahui tingkat kelulusan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rincian Realisasi Kelulusan Peserta Diklat

Jenis Diklat	Tema	Realisasi Peserta	Realisasi Kelulusan
Diklat Manajerial	Diklat PIM IV	34	34
	Latsar CPNS Gol II	129	128
	Latsar CPNS Gol III	197	197
Diklat Teknis	Diklat TOT PIP	17	16
	Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	47	42
Diklat Fungsional	Diklat Pranata Humas Tingkat Ahli	74	74
	TOTAL	498	491
PRESENTASE KELULUSAN			99%

Gambar 3.5
Tingkat Kelulusan Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis

Tingkat Kelulusan Diklat Manajerial, Fungsional dan Teknis



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana persentase kelulusan hanya sebanyak 89%, tahun 2019 jumlah peserta yang lulus meningkat menjadi **99%**. Perhitungan tersebut diambil dari tingkat kelulusan peserta dari diklat yang mempersyaratkan ujian sebagai syarat kelulusan.

Sumber dana program Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis Tahun 2019 berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Komunikasi sebesar Rp. 8.957.927.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.791.825.879 atau sekitar 86,98% dari total pagu.

SP.2 DIMANFAATKANNYA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran tersebut dicapai dengan indikator kinerja :

IKSP 2.1. Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan

Tabel 3.9

IKSK 2.1. Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan

SP.2 Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika			
Indikator	Target	Capaian	%
1. Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan	60 %	100 %	166 %

Pada tahun anggaran 2019, Badan Litbang SDM menghasilkan 11 (sebelas) Penelitian dari target semula 10 (sepuluh) Penelitian. Berikut judul dan simpulan dari *Executive Summary* Penelitian dimaksud:

1. Studi Penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri dan Luar Negeri merupakan ketentuan tarif LPU yang diberlakukan sebelum Permen Kominfo No. 29 Tahun 2013 yang dalam pembahasannya sejak tahun 2009, sehingga sangat dimungkinkan perubahan lingkungan eksternal saat ini sudah mengalami perubahan antara lain perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi makro. Karenanya dibutuhkan kajian strategis untuk menyesuaikan tarif LPU dengan kondisi saat ini untuk mengurangi beban kerugian PT. Pos Indonesia akibat penugasan LPU. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah tersusunnya skenario penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal dengan kondisi saat ini, pada era liberalisasi sektor pos. Sasaran studi penyesuaian tarif LPU yang diatur dalam Permen Kominfo Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal.

Kesimpulan studi ini membagi scenario menjadi 2, yakni: skenario kenaikan tarif surat DN dengan pertimbangan proyeksi produksi surat akan terus menurun; dan Skenario kenaikan tarif paket DN dengan pertimbangan proyeksi produksi paket mengalami tren yang meningkat.

Skenario kenaikan tarif surat DN dengan pertimbangan proyeksi produksi surat akan terus menurun:

1. Kenaikan tarif 103% berdasarkan pengaruh faktor eksternal diproyeksikan dapat memberikan keuntungan; 2. Kenaikan tarif 90,5% berdasarkan Harga Pokok Produksi (HPP) dan mencapai BEP sehingga tidak ada selisih tarif antara biaya layanan dan tarif LPU surat dalam negeri; 3. Kenaikan tarif sebesar 131% berdasarkan konversi tabel point to point ke zona AKDP dan AKAP surat diproyeksikan akan memberikan keuntungan rata-rata Rp. 5 Miliar / tahun sampai tahun 2023. Skenario kenaikan tarif paket DN dengan pertimbangan proyeksi produksi paket mengalami tren yang meningkat. 1. Kenaikan tarif 103% berdasarkan pengaruh faktor eksternal akan mengurangi kerugian selisih tarif hingga mencapai hampir 60% sampai dengan 2023; 2. Kenaikan tarif 200% berdasarkan Harga Pokok Produksi (HPP) dan mencapai BEP sehingga tidak ada selisih tarif antara biaya layanan dan tarif LPU paket dalam negeri; 3. Kenaikan tarif sebesar 227,5% berdasarkan tabel tarif point to point paket diproyeksikan akan memberikan keuntungan rata-rata 58 miliar rupiah/tahun sampai tahun 2023 dengan perbedaan tarif paket LPU dengan tarif komersial terendah hanya sekitar 20%.

Dari kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan bagi PT. Pos Indonesia adalah:

- 1) Sesuai amanat PP 15 tahun 2013 pasal 34 yang menyatakan bahwa penetapan tarif LPU perlu memperhitungkan daya beli masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan peraturan kenaikan tarif perlu memperhatikan faktor tersebut; dan
- 2) Perlu memperhitungkan dampak dan mekanisme perhitungan tarif LPU internasional sehubungan dengan adanya kongres luar biasa ke-3 Universal Postal Union pada September 2019.

2. Analisis Kebutuhan Regulasi Pembangunan Small Cell 5G di Indonesia

Teknologi telekomunikasi seluler merupakan teknologi yang berkembang paling cepat dibandingkan teknologi-teknologi lainnya. Sekitar 10 tahun sekali generasi baru teknologi seluler diperkenalkan, dan tiba saatnya kini pemerintah Indonesia mempersiapkan adopsi teknologi generasi ke-5 (5G). Pembangunan infrastruktur 5G merupakan salah satu bagian dari pengarusutamaan (mainstreaming) transformasi digital yang tercantum pada rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Small cell merupakan salah satu teknologi pendukung yang penting untuk dapat memenuhi target-target teknologi 5G. Ukurannya yang kompak membuatnya fleksibel untuk ditempatkan baik pada tiang-tiang telekomunikasi maupun pada tiang-tiang lampu jalan, papan reklame, dinding bangunan, dll. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan skalabilitas jaringan. Namun dalam prakteknya regulasi saat ini belum sepenuhnya mengakomodir kehadiran small cell. Oleh sebab itu, studi ini berusaha untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi adopsi teknologi *small cell*.

Untuk mengakomodir masifnya implementasi small cell, diusulkan beberapa rekomendasi berikut:

- 1) Memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia (seperti tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu, dinding-dinding bangunan, dll) sebagai sarana untuk memasang perangkat small cell. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi proses perizinan dan besaran biaya retribusi. Namun untuk itu diperlukan sebuah petunjuk teknis pemasangan small cell pada infrastruktur-infrastruktur tersebut untuk meminimalisasi resiko kesehatan dan menekan polusi visual yang ditimbulkan oleh masifnya pemasangan small cell. Pada tingkat daerah aturan ini diperlukan sebagai dasar pemanfaatan infrastruktur-infrastruktur tersebut;
- 2) Infrastruktur tiang telekomunikasi (ketinggian tidak lebih dari 11-12 m) selayaknya tidak dikategorikan sebagai bangunan beresiko tinggi. Dengan demikian perlu peninjauan kembali terhadap persyaratan teknis dan administratif perizinan pembangunan infrastruktur tersebut. Persyaratan yang kurang relevan, sebagai contoh izin atau sosialisasi warga, dapat dihilangkan. Selain itu, besaran retribusi perlu disesuaikan dengan nilai yang lebih acceptable dan IMB seharusnya berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan struktur;
- 3) Dapat dipertimbangkan model bisnis *small cell as a service* (SCaaS) dengan *neutral host* dimana jaringan disediakan oleh pihak ketiga dan operator-operator berperan sebagai penyewa. Selain untuk menekan biaya-biaya, hal ini juga perlu untuk meminimalisasi penumpukkan perangkat small cell dari beberapa operator yang berpotensi meningkatkan polusi visual. SCaaS juga diharapkan dapat menekan defisit neraca perdagangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan perangkat small cell dan perangkat pengguna secara massif;
- 4) Mendorong operator dan vendor untuk menerapkan teknologi virtualisasi pada jaringannya, khususnya pada jaringan-jaringan baru. Selain meingkatkan skalabilitas dan fleksibilitas, hal ini juga diharapkan dapat menekan biaya-biaya jaringan dan lebih cepat di dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat;
- 5) Pemerintah daerah perlu membuat terobosan-terobosan baru di dalam proses perizinan infrastruktur telekomunikasi, sebagai contoh dengan menerapkan perizinan infrastruktur small cell secara kolektif/kluster (tidak lagi satu-satu) disesuaikan dengan jumlah dan lokasi pemasangan perangkat *small cell*;
- 6) Perlu percepatan pelaksanaan perizinan secara elektronik secara penuh pada pemerintah daerah untuk mendorong transparansi, dan percepatan pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan;
- 7) Perlu adanya asistensi terhadap pemerintah daerah di dalam menyusun regulasi terkait infrastruktur telekomunikasi dan menjadikan pemerintah daerah tersebut sebagai percontohan bagi pemerintah daerah lainnya. Hal ini penting mengingat besarnya efek *copy paste* regulasi di antara pemerintah-pemerintah daerah;
- 8) Perlu adanya harmonisasi peraturan di antara ekosistem regulator infrastruktur telekomunikasi untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih dan pertentangan peraturan.

3. Analisis Perencanaan SDM PT Pos Indonesia

PT. Pos Indonesia (Persero) perlu melakukan evaluasi terhadap produk dan layanan bidang kurir dan logistik, jasa keuangan, dan benda pos, terkait dengan kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia dalam menghadapi persaingan saat ini. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia PT. Pos Indonesia melalui beberapa skenario berdasarkan pemetaan produk dan layanan perposan yang ideal sesuai dengan kebutuhan pasar.

Rekomendasi kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia PT. Pos Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Dari sisi produk dan pasar, PT. Pos Indonesia dapat mengoptimalkan produk-produk yang kurang pesaingnya (*blue ocean*). Selain itu, PT. Pos Indonesia juga dapat terjun pada pasar yang sudah dibentuk oleh perusahaan perposan lainnya;
- 2) Struktur organisasi PT. Pos Indonesia dapat lebih dioptimalkan lagi untuk memperoleh efisiensi baik dari sisi tata kelola, dan PT Pos perlu meminimalkan rentang kendali dengan cara mereduksi bagian-bagian atau divisi-divisi yang berpotensi tumpang tindih dan mengurangi leveling jabatan;
- 3) PT. Pos Indonesia dapat menggunakan strategi *zero-growth* untuk lebih mengefisienkan beban pegawai. Strategi ini dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai secara natural, atau berkurang secara bertahap sampai dengan 5 tahun kedepan. Strategi ini diambil agar tidak terjadi guncangan seperti halnya dengan melakukan opsi merumahkan pegawai;
- 4) Untuk menyederhanakan proses manajemen SDM, PT. Pos Indonesia dapat menggunakan strategi kemitraan dengan beberapa keuntungan seperti mengurangi biaya fixed cost seperti biaya-biaya THR, jaminan perlindungan seperti upah, lembur, tunjangan, waktu istirahat, jam kerja maksimum, jaminan sosial/asuransi, dan sakit. Selain itu juga dapat mengurangi kerumitan proses manajemen SDM seperti keterlibatan Serikat Pegawai.

4. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Digital Terrestrial Television (DTT)

Digital Terrestrial Television (DTT) atau Televisi Terrestrial Digital merupakan teknologi yang menghemat penggunaan frekuensi radio oleh lembaga penyiaran dengan kualitas gambar semakin tajam. Beberapa keuntungan televisi terrestrial digital dibandingkan dengan televisi analog diantaranya gambar yang lebih jelas (tidak berbayang/*noise*), resolusi lebih besar, layanan ramah penonton (ada teks terjemahan/subtitle), data penyiaran lebih lengkap, dan terdapat panduan program elektronik.

Sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk menetapkan *Analog Switch Off* (ASO) di tahun 2020, namun kondisi saat ini belum ada kepastian hukum atau regulasi yang mendukung rencana program tersebut. Disamping itu, data jumlah kepemilikan perangkat DTT di masyarakat belum tersedia. Studi ini memberikan kajian mengenai tingkat pemahaman masyarakat dan faktor yang mendorong adopsi DTT di tengah keterlambatan migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di wilayah uji coba siaran Tahap IV.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi oleh pemerintah dapat dilanjutkan dan intensitasnya dapat ditingkatkan dengan lebih memfokuskan kepada sosialisasi tatap muka, melalui TV/radio, dan media sosial. Sosialisasi melalui media tatap muka lebih dipilih masyarakat karena adanya kemungkinan interaksi antara masyarakat dan penyelenggara sosialisasi. Cakupan sosialisasi tatap muka sebaiknya langsung ke masyarakat (minimal di tingkat kelurahan), tidak hanya di kampus/kantor Pemda;

- 2) Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan sektor ritel barang-barang elektronik sebagai agen sosialisasi TV digital kepada masyarakat;
- 3) Perlu peningkatan jumlah kanal siaran DTT agar masyarakat lebih tertarik untuk migrasi ke siaran DTT. Disamping itu, konten siaran DTT juga perlu diperkaya dengan menitikberatkan kepada konten-konten yang paling banyak diminati masyarakat, seperti berita, hiburan, dan olah raga;
- 4) Dilihat dari perspektif pengguna, percepatan ASO dapat dilakukan dengan fasilitasi pemerintah dan industri dengan menyediakan STB dengan harga terjangkau. Namun yang tidak kalah penting adalah ketika ASO dilakukan, semua wilayah yang selama ini tercapuk oleh siaran TV analog telah terlayani dengan siaran TV digital terrestrial;
- 5) Dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 5.4 juta (BPS, 2019), dimana 15,5 juta berada di pedesaan dan 9,9 juta rumah tangga miskin berada di perkotaan. Jika diasumsikan di perkotaan diberikan STB bersubsidi (masyarakat membayar hanya 100 Ribu, hanya STB) dan di pedesaan diberikan STB dan antena gratis, total anggaran yang harus disediakan sebesar 1,48 T. Bantuan STB dan antena gratis (baik dari pemerintah maupun pihak swasta) harus tepat sasaran dengan melibatkan Pemda dan aparat desa terkait.

5. Kajian Sinergisitas Penyelenggaraan Layanan OTT Dengan Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia

Perilaku digital di berbagai belahan dunia mengarah pada konvergensi di dalam perangkat mobile, fenomena tersebut ditandai dengan semakin menguatnya penggunaan aplikasi messaging dan media sosial. Seiring meningkatnya akses layanan data, keuntungan finansial di bidang yang relatif baru ini ternyata lebih banyak dinikmati oleh perusahaan OTT dibandingkan dengan pihak penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi dituntut untuk mengembangkan infrastruktur dengan modal investasi yang cukup besar. Di sisi lain, OTT bebas beroperasi kapan saja dan dimana saja, dengan perolehan keuntungan yang terus meningkat, tanpa perlu membayar kepada operator atau perusahaan telekomunikasi lokal. Pemerintah memiliki peran mengatur penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika melalui penetapan regulasi dan kebijakan untuk melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Oleh sebab itu studi ini berusaha mengkaji lebih lanjut mengenai kondisi keberadaan layanan OTT di Indonesia saat ini beserta dampaknya terhadap industri atau penyelenggara telekomunikasi di Indonesia agar dapat menjadi landasan dan referensi bagi penetapan regulasi dan kebijakan dimaksud.

Dari hasil penelitian, dapatlah disimpulkan bahwa pertumbuhan layanan OTT sangat mempengaruhi pendapatan operator telekomunikasi khususnya pada layanan voice & SMS. Terjadi penurunan CAGR terbesar pada tahun 2018 sebesar 28%. Tren menunjukkan bahwa layanan suara terus menurun, karena digantikan oleh. Pada tahun 2018, penggunaan layanan suara operator turun menjadi sekitar 60 menit/bulan yang sebelumnya menghabiskan 107 menit/bulan pada tahun 2013 karena migrasi layanan OTT seperti WhatsApp dan Line. Pendapatan dari layanan data belum menggantikan meskipun trafik layanan data sudah menunjukkan peningkatan. Dalam menghadapi pertumbuhan layanan OTT ini beberapa negara menerapkan kebijakan yang mendukung netralitas jaringan, yang mewajibkan izin penyelenggaraan layanan OTT dan yang mendorong kerjasama antar operator dan OTT. Indonesia sendiri masih belum ada regulasi yang kuat dalam mengatur layanan OTT ini.

Dari hasil kajian di atas, Peneliti merekomendasikan bahwa diperlukan kebijakan terkait penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, yang mengatur:

- 1) Persaingan usaha yang sehat antara penyedia layanan OTT dengan operator;
- 2) Kewajiban kerjasama OTT dengan operator; dan
- 3) Meningkatkan daya saing layanan OTT lokal.

6. Proyeksi Kebutuhan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia (2019-2030)

Studi jangka pendek ini menggunakan *mixed-method* yang bertujuan untuk mengetahui proyeksi jumlah kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sampai dengan tahun 2030, dan profesi-profesi TIK apa saja yang dibutuhkan oleh industri dan startup di Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0 ini.

Dari hasil studi ini diperkirakan Indonesia akan membutuhkan sebanyak 15.2 juta SDM di bidang TIK, dengan rata-rata kebutuhan per tahun sebanyak 768.480 untuk *enterprise* dan *startup*. Sedangkan *demand* profesi TIK sepuluh tertinggi yaitu *developer/programmer*, *data analyst/big data scientist*, diikuti oleh *network engineer*, *artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) specialist*, *enterprise architect*, *cloud & distributed computing specialist*, *IOT specialist*, *building information modelling specialist*, *information security specialist*, *graphic designer*. Kebutuhan SDM TIK tertinggi terlihat pada sektor usaha perdagangan besar eceran. Hal ini sejalan dengan kebutuhan *wholesale* dan *retail* untuk merambah pemasaran online sehingga memerlukan SDM TIK untuk mengelola platform digital yang digunakan.

Proyeksi jumlah kebutuhan SDM TIK di Indonesia dan profesi-profesi di bidang TIK dengan *demand* tertinggi diharapkan dapat dijadikan *baseline* kebijakan pengembangan SDM TIK di Indonesia, khususnya yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo sehingga lebih tepat guna dan tepat sasaran.

7. Perkembangan dan Strategi Arah Pengembangan Ekonomi Digital

Berdasarkan sistem perkembangan dan pengembangan ekonomi digital, ditemukan 4 (empat) butir strategi pengembangan dengan fokus pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk membangun ekonomi digital. Keempat strategi tersebut adalah mengembangkan e-agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi *nerve center* di dalam negeri menjadi prioritas strategi pertama dengan bobot 0.523. Kedua, mendorong lahirnya platform dan kreator produk digital dalam skala regional *e-commerce* dengan bobot 0.236. Ketiga adalah mengembangkan kebijakan *end to end business cycle* melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multipihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia dengan bobot 0.168. Keempat, menguatkan tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis sumberdaya lokal dengan bobot 0.073.

Implikasi hasil penelitian menyimpulkan perlu merubah metodologi riset kebijakan dalam pengembangan ekonomi digital ke depan. Satu pilihan metodologi dengan merujuk pandangan Dewan Riset Nasional (DRN) adalah membangun riset aksi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis prinsip pengembangan *Human Inquiry Methodology*. Untuk itu, piloting dalam skala regional untuk pengembangan ekonomi digital yang menampung keragaman kemajuan masyarakat Indonesia perlu dilakukan. Keempatnya tidak hanya mencakup pengembangan desain tetapi juga mencakup implementasi atas desain yang memuat kekhasan perkembangan ekonomi lokal yang dikembangkan berbasis ekonomi digital.

Berdasarkan *expert judgement*, disimpulkan bahwa riset aksi dapat dimulai dengan pengembangan e-agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi *nerve center* dalam negeri. Proses pengembangan ini perlu juga dilandasi dengan mendorong lahirnya *platform* dan kreator produk digital yang dikelola oleh *e-commerce* dengan basis ekonomi lokal. Dalam prosesnya, kedua langkah inisiasi tersebut dapat diperbesar skalanya melalui pengembangan kebijakan *end to end business cycle* melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multipihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia. Untuk mendukung pengembangan diatas, diperlukan juga penguatan tata kelola pengembangan ekonomi digital berbasis lokalitas dalam konteks implementatif dan sinergis bagi seluruh pemangku kepentingan yang sudah dan yang akan terlibat di dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia ke depan.

Satu pilihan fokus yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memperkuat daerah pinggiran khususnya Kawasan Perbatasan. Di kawasan ini diharapkan masyarakat diperkuat kesejahteraannya melalui ekonomi digital agar meningkatkan partisipasi mereka dalam mempertahankan garis batas negara. Tidak ada kedaulatan tanpa kemakmuran artinya teknologi digital tidak hanya berhenti pada penyediaan konektivitas komunikasi, tetapi juga perlu bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Fokus kegiatan yang diusulkan sebaiknya adalah mendorong penurunan biaya pelayanan bagi masyarakat perbatasan berbasis teknologi digital, khususnya untuk akses terhadap bidang pendidikan, kesehatan, layanan kependudukan, dan komunikasi. Disamping itu ketersediaan ekonomi digital perlu diikuti oleh pendampingan pemanfaatan ekonomi digital untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti pemanfaatan untuk kunjungan wisata dan pengembangan produk budaya lokal. Fokus utama lain adalah memperkuat tata kelola pembangunan perbatasan khususnya kerjasama antar K/L dan beragam pihak yang berkepentingan berbasis teknologi digital. Lokus perhatian terhadap kawasan perbatasan ini disarankan memilih kawasan perbatasan dalam kategori *Oustanding Boundary Problems (OBP)*. Oleh karena penguatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan ini menjadi penting untuk menjaga kelanjutan kedaulatan negara.

8. Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Secara keseluruhan, skor untuk kesiapan implementasi regulasi perlindungan data pribadi di Dinas Dukcapil Tingkat Kabupaten/Kota sudah lebih dari 60%, dengan aspek SDM yang memiliki skor keseluruhan paling tinggi (76,41%).

Berdasarkan pembagian wilayah (Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur), keseluruhan aspek memiliki skor diatas 50%. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah pada aspek infrastruktur, dimana pada wilayah Indonesia Bagian Timur skornya lebih tinggi dari wilayah lain. Perbedaan antara wilayah Timur dan Barat pada aspek infrastruktur adalah di Indonesia Barat mayoritas Dinas Dukcapil menggunakan infrastruktur elektronik, sedangkan di wilayah Timur masih dominan infrastruktur konvensional.

Dalam rangka mengimplementasikan Regulasi PDP diperlukan strategi yang mencakup beberapa aspek antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Diperlukan Standar Kompetensi SDM Pengelola Data Pribadi, baik dari level operasional sampai dengan level manajerial.
- Diperlukan pelatihan dan forum diskusi pengelola data pribadi yang terstruktur.

2. Regulasi terkait Perlindungan Data Pribadi
 - Perlunya panduan pendukung RUU Perlindungan Data Pribadi.
 - Perlunya Standar Keamanan Data Pribadi baik dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik.
 - Harmonisasi peraturan terkait perlindungan data pribadi.
3. Sosialisasi
 - Koordinasi antar Lembaga untuk sosialisasi internal dan eksternal.
 - Konten sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan awareness masyarakat & pengelola data terkait perlindungan data pribadi.

9. Pengembangan Konsep GPR di Era Revolusi Industri 4.0

Aspek SDM GPR Kominfo diharapkan juga memiliki kompetensi di bidang *Big Data (data analysis)* dan *Artificial Intelligence-AI (data learning)*. Dengan kompetensi data analysis, GPR diharapkan mampu melakukan *Sentimen Analisis Network-SNA* terhadap berbagai isu-isu aktual yang ada. Dengan demikian mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan menangani berbagai *hoax* dan juga isu-isu yang dapat menjadi masalah nasional. Sedangkan, *data learning* adalah persiapan dalam era revolusi industry 4.0, yaitu otomatisasi. Kominfo memiliki mesin Pengais Konten, namun masih pada level *crawling data*. Jika Mesin Ais tersebut digunakan juga untuk memperkuat GPR dan dilengkapi dengan AI, di masa mendatang menjadi *tools* yang efektif dan efisien dalam melakukan deteksi dini terhadap *hoax* dan juga berbagai krisis yang akan terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka ada tujuh rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran GPR Kominfo tidak saja sebagai *Disseminator*, tapi juga sebagai *Publicist, Framing Maker, dan Fact Checker* untuk menangkal *hoax* dan isu radikalisme melalui media sosial.
2. Menynergikan program, SDM, dan teknologi maju (mesin Ais) antara Ditjen Aptika dan Ditjen IKP dalam menghadapi *hoax* dan isu radikalisme. Penggunaan mesin Ais dioptimalkan untuk menghasilkan *daily brief* terkait isu-isu dalam bidang Politik, Sosial, Budaya, Hankam, dsb yang perlu diantisipasi dan ditangani oleh GPR.
3. Melakukan pemetaan ulang stakeholders GPR di era revolusi industri 4.0 sehingga sasaran kegiatan program berjalan dengan optimal.
4. Melakukan revitalisasi personil dan kelembagaan GPR termasuk di antaranya: *influencer, opinion maker, spoke persons* yang relevan dan memiliki kedekatan dengan publik untuk mengadaptasi perubahan.
5. Mengubah mindset GPR Kominfo dari pranata humas menjadi humas profesional yang tercermin dari perilaku dan kebiasaan keseharian yang aktif dalam menyebarkanluaskan pesan positif tentang pembangunan Nasional melalui akun media sosial milik pribadi maupun akun resmi Kominfo.
6. Meningkatkan kompetensi SDM GPR Kominfo dengan pelatihan di bidang teknologi maju seperti *big data (data analysis, contoh: Sentimen Analisis Network-SNA)* dan AI (*data learning*).
7. Membuat kebijakan/SOP sebagai panduan untuk penyelenggaraan GPR (humas pemerintah).

10. Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat

Survei bertujuan untuk mendapatkan gambaran penggunaan TIK dan implikasinya terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya data komprehensif dan mampu memberikan gambaran riil tentang penggunaan TIK serta aspek-aspek sosial budaya dan ekonomi yang dipengaruhi oleh penggunaan TIK rumah tangga dan individu.

Profil responden merata dari golongan usia remaja sampai dengan yang tua. 5,52% Rumah Tangga sudah berlangganan akses internet Fixed Broadband (meningkat dari tahun 2018: 4,77%). Pada level kecamatan: 34,6% kecamatan sudah terdapat akses internet Fixed Broadband. Rata-rata pengeluaran akses internet Fixed Broadband rumah tangga per bulan sebesar Rp. 277.558,2.

Pada Aspek Pendidikan, skill TIK yang paling besar dimiliki oleh masyarakat masih skill TIK dasar seperti menyalin (copy paste) teks/informasi dari dokumen (40,5%); Sedangkan skill untuk pemrograman masih sangat sedikit yaitu 2,24%.

Pada Aspek Sosial, terjadi pergeseran penggunaan gawai dari komunikasi telepon dan sms menjadi chatting (menggunakan akses internet). Pada aspek sosial terkait pelayanan pemerintah, masih 31,8% masyarakat yang pernah mengakses layanan pemerintah.

Pada Aspek Budaya, penggunaan perangkat TIK diyakini memudahkan responden membedakan informasi benar dan tidak benar. Googling paling sering dilakukan responden untuk menentukan kebenaran suatu informasi (74,5%).

Pada Aspek Ekonomi, 38,4% responden telah menggunakan TIK untuk menjual secara online; Dengan media yang digunakan untuk menjual secara online paling banyak adalah media sosial dan instant messaging. Masih 20% responden yang baru memanfaatkan marketplace, dan 4,87% yang membangun website sendiri. 50,1% responden telah menggunakan TIK untuk membeli secara online namun frekuensinya masih sangat jarang (>3 bulan sekali). Marketplace lebih banyak digunakan untuk membeli (41,55%) daripada menjual (20,00%); Banyak fitur di marketplace yang dirasakan memudahkan dan juga terdapat promo yang menarik bagi para pembeli. 53,75% responden bermasalah dengan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. 28,32% bermasalah dengan pengiriman barang. 11,30% bermasalah karena tidak ada kebijakan pengembalian. 3,33% bermasalah dengan keamanan data pribadi, dan 1,02% responden bermasalah dengan hal lainnya seperti penipuan, barang rusak, dan keterlambatan jadwal tiba. 34,76% responden belum pernah ada masalah.

11. Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik

Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan sampel 25 provinsi dari total jumlah provinsi di Indonesia 34, maka tercatat nilai indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik rata-rata provinsi adalah 65.10. Nilai indeks ini masih dianggap “cukup” atau “sedang”, dan penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik masih yang pertama kali dilakukan tahun 2019 ini. Yang kemungkinannya untuk tahun depan dapat “direvisi” untuk memperoleh nilai indeks yang ideal atau “baik”. Hal ini mungkin dapat ‘dibandingkan’ atau dapat melihat dengan nilai indeks dari kasus yang lain, seperti dari Indeks Demokrasi Indonesia. Dijelaskan oleh capaian IDI 2016 terkait dengan “potret demokrasi di Indonesia?”. Capaian overall indeks nasional sebesar 70,09 pada tahun 2016 tersebut, secara

kuantitas mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan kinerja demokrasi di tanah air, bila dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2015 (72,82). Namun demikian, secara kualitas, penurunan capaian kinerja demokrasi di Indonesia pada tahun 2016, masih tetap pada kategori yang sama dengan tahun 2015 yaitu "sedang". Ini berarti, "perjalanan masih panjang", dan bahkan "mendaki" untuk dapat membus kategori "baik" (>80). Kemudian dapat dilihat pula dengan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2018, menurut Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers Periode yang lalu), tercatat "nilai indeksnya bahwa kemerdekaan pers meningkat, tetapi hoax dan penyalahgunaan kemerdekaan pers juga meningkat". Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers adalah ke tiga kalinya Dewan Pers berhasil menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia yang menggambarkan situasi pers Indonesia secara lengkap sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Pada kali ke tiga ini Dewan Pers berhasil menyusun indeks secara lengkap di 34 provinsi selndonesia. Pada IKP 2017 indeks yang tersusun baru melingkupi 30 provinsi, sedangkan IKP 2016 hanya mencakup 24 provinsi. Nilai IKP secara nasional pada tahun 2018 adalah sebesar 69,00, yaitu angka yang menunjukkan bahwa nilai indeks kemerdekaan pers masih "agak bebas". Ada tiga region yang memiliki indeks rata-rata di atas rata-rata nasional yaitu Kalimantan (77.10), Sumatera (73.15), dan Sulawesi (71.04). Keadaan ini membaik dibandingkan kondisi sebelumnya dimana indeks IKP 2017 adalah 68.95. Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum. Namun, bila dilihat lebih detail, kemerdekaan pers Indonesia pada 2017 tetap seperti tahun sebelumnya mengalami defisit di hal kebebasan-untuk (freedom for). Di satu sisi aspek-aspek kemerdekaan pers seperti kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan berada dalam kondisi baik. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa menguatirkan. Dalam penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2018 tergambar bagaimana konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media bersangkutan. Seperti yang kita ketahui beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Bila dikaitkan dengan berbagai indikator lain, pengaruh dan kendali kelompok kepentingan kuat dalam media massa di Indonesia masih besar. Pada era keterbukaan informasi dan komunikasi dewasa ini hak masyarakat untuk mengetahui segala hal tentang informasi senantiasa diberikan ruang yang lebih luas, meski demikian ruang kebebasan yang mereka peroleh tetap dibatasi oleh hak orang lain. Konsep demokrasi menghendaki adanya keseimbangan dalam menjalankan semua hak dan kewajiban, baik secara individu, kelompok, dan kelembagaan tertentu. Sebagaimana dalam hasil survei indeks informasi dan komunikasi ini, pemenuhan hak untuk mengetahui (right to know) dari masyarakat dapat di petakan dalam berbagai item pertanyaan. Misalnya ketika di ajukan pertanyaan pilihan, "apakah kondisi-kondisi dalam item pertanyaan dibawah ini sudah atau belum terwujud saat ini, jawaban yang beragam dari aspirasi responden.

Nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik masih dianggap "cukup" atau "sedang" dengan nilai rata – rata provinsi adalah 65.10 yang mempunyai makna bahwa pengelolaan informasi publik masih dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik. Perlu diingat bahwa penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik masih yang pertama kali dilakukan tahun 2019 ini. Yang diharapkan untuk tahun depan dapat "direvisi " untuk memperoleh nilai indeks yang ideal atau "baik", sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Dari simpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah, perlu dilakukan survei pemetaan untuk mengetahui pemenuhan hak masyarakat atas informasi (rights to know) dalam berbagai item pertanyaan, sehingga dapat diperoleh suatu nilai Indeks Pengelolaan dan Informasi Publik yang ideal.

Untuk memastikan hasil Penelitian tepat sasaran, tepat sasaran, bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti oleh *stakeholders*, Badan Litbang SDM telah mendapatkan masukan judul Penelitian dari satker *user* yang akan menggunakan hasil Penelitian agar hasil penelitian tepat guna dan tepat sasaran serta dapat langsung digunakan menjadi landasan kebijakan. Dengan target 60% Penelitian bermanfaat untuk menjadi kebijakan, maka minimal 7 (tujuh) Penelitian harus dinilai Bermanfaat oleh *stakeholders*.

Setelah Penelitian selesai di penghujung tahun 2019, Laporan Penelitian diedarkan ke *stakeholders* untuk menilai kebermanfaatannya hasil penelitian apakah dapat menjadi acuan pengambilan keputusan/kebijakan. Berikut merupakan rekap kuesioner *feedback* Penelitian:

Tabel 3.10
Feedback Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2019

No.	Judul	Stakeholder	Bermanfaat (√) Tidak (x)
1.	Studi Penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal	Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media I, Kementerian BUMN	√
2.	Analisis Kebutuhan Regulasi Pembangunan Small Cell 5G di Indonesia	Dit Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI Kemenkominfo	√
3.	Analisis Perencanaan SDM PT Pos Indonesia	Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media I, Kementerian BUMN	√
4.	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Digital Terrestrial Television (DTT)	Dit. Penyiaran, Ditjen PPI Kemenkominfo	√
5.	Kajian Sinergisitas Penyelenggaraan Layanan OTT Dengan Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 	√
6.	Proyeksi Kebutuhan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia (2019-2030)	BPPTIK Cikarang Kemenkominfo	√
7.	Perkembangan dan Strategi Arah Pengembangan Ekonomi Digital	Dit. Ekonomi Digital, Ditjen Aptika Kemenkominfo	√
8.	Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Dit. Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ditjen Aptika Kemenkominfo	√
9.	Pengembangan Konsep GPR di Era Revolusi Industri 4.0	Sesditjen IKP, Ditjen IKP Kemenkominfo	√
10.	Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat	Pusat Kelembagaan Internasional, Setjen Kemenkominfo	√
11.	Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Dit. Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kemenkominfo	√

Dari rekap di atas, dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) Penelitian dinilai Bermanfaat oleh *stakeholders* dari total 11 (sebelas) Penelitian. Angka ini melampaui target awal yakni sebesar 7 (tujuh) Penelitian atau 60% Penelitian yang dihasilkan dianggap Bermanfaat. Maka, Penelitian yang dihasilkan Badan Litbang SDM **dinilai 100%** Bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti *stakeholders*. Dari rekap tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian IKSP 2.1. (Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan) cukup jauh melampaui target, yakni **166%**.

Sumber dana Penelitian Tahun 2019 sendiri berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Komunikasi sebesar Rp. 10.691.085.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.312.568.963 atau sekitar 96,46% dari total pagu.

SP.3 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA BADAN LITBANG SDM

Sasaran tersebut dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut :

IKSP 3.1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM

Tabel 3.11
IKSP 3.1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM			
Indikator	Target	Capaian	%
1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM	≥ 76	90.5 %	119 %

Berdasarkan hasil evaluasi internal Itjen atas penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM TA 2019 dari Nota Dinas Inspektur IV selaku Pokja Monev Reformasi Birokrasi Nomor 276/IJ.5/PW.04.05/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, nilai pengungkit RB Badan Litbang SDM adalah 21,27 dari nilai maksimal 23,5 berdasarkan metode penilaian RB terbaru ($21,27/23,5 \times 100\%$) sehingga nilai RB Badan Litbang SDM adalah **90,51**. Sementara, target awal IKSP ini adalah nilai RB ≥ 76 sehingga capaian yang didapat melebihi 14,51 poin dari target awal, maka prosentase capaian IKSP ini adalah sebesar 119%.

IKSP 3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SM

Tabel 3.12
IKSP 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM			
Indikator	Target	Capaian	%
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM	≥ 67	73.73	110 %

Nilai sementara berdasarkan lampiran hasil evaluasi internal Itjen berdasarkan lampiran Surat Nomor 09/IJ.4/LHE/PW.01.06/09/2019 tanggal 16 September 2019, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2018-2019 hasil evaluasi internal Itjen adalah **73,72**. Pada target awal Perjanjian Kinerja IKSP ini adalah nilai AKIP ≥ 67 , ternyata capaian Badan Litbang SDM dapat melampaui target awal yang ditetapkan, maka prosentase capaian IKSP ini adalah sebesar 110%.

IKSP 3.3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018

Tabel 3.13

IKSP 3.3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM			
Indikator	Target	Capaian	%
3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018	≤ 1 %	0.08	198,80 %

Apabila dibandingkan dengan total realisasi anggaran TA 2018 sebesar Rp. 212.708.473.582, maka persentase temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018 adalah sebesar **0,08%** dari target semula yakni ≤ 1%. Karena polarisasi IKSP ini adalah Minimize dimana semakin kecil capaian dinilai menjadi semakin baik, maka prosentase capaian IKSP ini menggunakan rumus di bawah ini:

$$(1+(\text{Target}-\text{Realisasi}))*100\%$$

$$=(1+(1-0,012))*100\%$$

$$=(1+0,988)*100\%$$

$$=1,988$$

$$=198,80\%.$$

Maka capaian target ini adalah 198,80%.

IKSP 3.4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM

Tabel 3.14

KSP 3.4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM			
Indikator	Target	Capaian	%
4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM	a. Thn. Berjalan: 80%	a. Thn. Berjalan: 100%	100%
	b. Thn. Sebelumnya: 40%	b. Thn. Sebelumnya: 100%	

- Tahun berjalan
Berkaitan dengan IKSP 3.3 di atas, tindak lanjut hasil temuan tahun 2018 sebesar Rp 174.400.079 pada satuan kerja STMM Yogyakarta telah dikembalikan kepada kas negara pada 6 (enam) tahap dan selesai **100%** pada 12 November 2019.

- Tahun sebelumnya

Dari hasil pemeriksaan BPK, berikut data temuan sebelum tahun 2018 yang terdapat di lingkungan Badan Litbang SDM:


No.	Tahun	Judul LHP	Satker	LP	Status Temuan	Keterangan
1.	2010	Belanja Barang dan Modal 2009-2010	STMM	02.04	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan status selesai	Pengembalian ke kas negara Rp 10.310.720 (selesai)
2.	2010	Belanja Barang dan Modal 2009-2010	STMM	03.05	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan status selesai	Pengembalian ke kas negara Rp 16.679.524 (selesai)
3.	2010	LK 2009	BPSDMP Surabaya	15.2	Berdasarkan catatan Itjen perlu diajukan sebagai rekomendasi yang sudah tidak dapat ditindaklanjuti kembali dan diverifikasi oleh Itjen	Tidak dapat ditindaklanjuti
4.	2017		BBPSMP Medan		Ganti rugi atas tidak ditemukannya 29 barang Inventaris monografi berdasarkan berita acara hasil inventaris monografi Nomor: 990.A/BBPSDMP-MDN/PL.04.01/XII/2018 Tgl 7 Des 2018	Pengembalian ke kas negara Rp 1.731.544
5.	2018	LHP LK 2016		15.02	Selesai	Surat pernyataan dari Plt. Kepala Bagian Program dan Perencanaan Sekretariat BLSDM dan Kepala Bagian UMUM Sekretariat BLSDM Tanggal 1 Februari 2018

Dari table di atas, dapat terlihat bahwa Badan Litbang SDM telah memenuhi tindak lanjut atas temuan pengawasan eksternal pada tahun anggaran tahun 2018 ke bawah, sehingga secara umum **100%** temuan pengawasan eksternal telah ditindaklanjuti oleh Badan Litbang SDM.

IKSP 3.5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM

Tabel 3.15
KSP 3.15 IKSP 3.5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM

SP.3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM			
Indikator	Target	Capaian	%
5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM	≥ 94	93,59	99%



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM (unit eselon I) Tahun 2019 adalah **93.59** berdasarkan akses OMSPAN tanggal 9 Januari 2020. Skor tersebut dipengaruhi oleh indikator penilaian yang terdiri atas 12 indikator, yakni:

1. Pengelolaan UP (bobot 10%);
2. Data Kontrak (bobot 15%);
3. Kesalahan/Pengembalian SPM (bobot 6%);
4. Retur SP2D (bobot 6%);
5. Halaman III DIPA (bobot 5%);
6. Revisi DIPA (bobot 5%);
7. Penyelesaian Tagihan (bobot 15%);
8. Rekon LPJ Bendahara (bobot 5%);
9. Renkas/Perencanaan Kas (bobot 5%);
10. Realisasi Anggaran (bobot 20%);
11. Pagu Minus (bobot 4%); dan
12. Dispensasi SPM (bobot 4%).

Dari 12 indikator tersebut, 3 indikator terbesar yang tidak mencapai target adalah: Pengelolaan UP, Data Kontrak, dan Kesalahan SPM. Untuk IKSK ini, Badan Litbang hampir mencapai nilai yang semula ditargetkan yakni ≥ 94 namun untuk IKSK ini Badan Litbang SDM hanya mampu mencapai performa sekitar 99%.



REALISASI ANGGARAN



Alokasi anggaran awal Badan Litbang SDM tahun 2019 sebesar Rp. 263.470.629.000,-. Dalam perjalanan, ada penambahan sebesar Rp. 122.018.122.000,-, sehingga alokasi anggaran Badan Litbang SDM menjadi Rp. 385.488.751.000,-. Penambahan anggaran di Badan Litbang SDM, dikarenakan :

1. Hibah "Information Technology Management Support For Ict Training And Development Center" dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) sebesar Rp. 2.773.988.910,-;
2. Kegiatan Digital Talent Scholarship sebesar Rp. 109.364.533.000,-;
3. Insentif sebesar Rp. 5.239.390.000,-

Tabel 3.16
Rincian Anggaran DIPA Petikan Badan Litbang SDM (dalam ribuan rupiah)

PAGU PER JENIS BELANJA							
No.	Program	51 Belanja Pegawai	52 Belanja Barang		53 Belanja Modal	57 Belanja Bantuan Sosial	Total Pagu
			OPS	Non OPS			
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika							
1.	Badan Litbang SDM	24.563.428	18.392.919	184.819.536	2.626.648	-	230.402.531
2.	STMM Yogyakarta	21.603.317	6.414.412	10.847.075	17.603.199	-	56.468.003
3.	BBPSDMP Medan	4.690.500	1.845.575	9.229.202	52.500	-	15.817.777
4.	BBPSDMP Makassar	5.141.438	2.238.719	7.016.374	75.000	-	14.471.531
5.	BPSDMP Jakarta	2.312.040	1.131.454	3.743.957	11.600	-	7.199.051
6.	BPSDMP Bandung	3.656.164	902.900	2.811.780	104.000	-	7.474.844
7.	BPSDMP Yogyakarta	3.693.637	743.193	4.791.545	56.600	-	9.284.975
8.	BPSDMP Surabaya	2.809.778	1.179.049	5.706.065	11.802	-	9.706.694
9.	BPSDMP Banjarmasin	2.357.908	766.410	3.296.387	35.613	-	6.456.318
10.	BPSDMP Manado	2.223.165	1.616.648	3.196.000	125.000	-	7.160.813
11.	BPPTIK	2.858.116	4.938.167	8.449.553	4.800.378	-	21.046.214
Jumlah		75.909.491	40.169.446	243.907.474	25.502.340	-	385.488.751

Dari pagu sebesar Rp 385.488.751.000, realisasi anggaran Badan Litbang SDM adalah sebesar Rp 354.473.239.980 sehingga prosentase capaian realisasi anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019 adalah sekitar 91,95% . Pagu dan realisasai anggaran Badan Litbang SDM 2019 per jenis dapat dilihat pada tabel berikut :

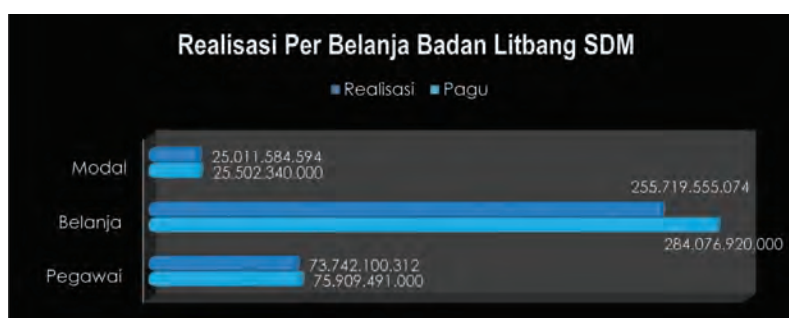
Tabel 3.17

Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Pegawai	75.909.491.000	73.742.100.312	97%
2.	Belanja	284.076.920.000	255.719.555.074	90%
3.	Modal	25.502.340.000	25.011.584.594	98%
Jumlah		385.488.751.000	354.473.239.980	91,95%

Gambar 3.6

Realisasi Per Belanja Badan Litbang SDM



Kinerja keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 berdasarkan distribusi per unit kerja di lingkungan Badan Litbang SDM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Kinerja Keuangan Badan Litbang SDM

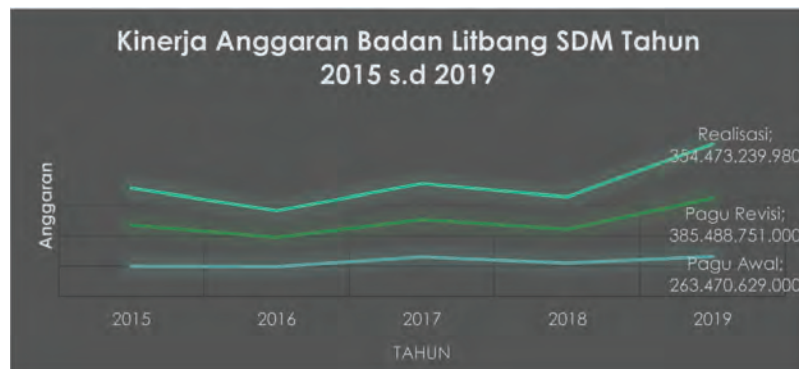
No.	Satker	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa	%
1.	Set. Badan Litbang SDM	74.791.195.000	75.235.274.000	72.547.936.147	2.687.337.853	96,43%
2.	Puslitbang Aptika dan IKP	5.120.000.000	5.120.000.000	4.800.143.242	319.856.758	93,75%
3.	Puslitbang SDPPPI	4.520.000.000	4.520.000.000	4.456.481.008	63.518.992	98,59%
4.	Pusbang Profesi dan Sertifikasi	24.375.492.000	133.740.025.000	113.529.589.744	20.210.435.256	84,89%
5.	Pusdiklat	7.949.037.000	8.957.927.000	7.791.825.879	1.166.101.121	86,98%
6.	STMM	51.614.792.000	56.468.003.000	54.462.375.305	2.005.627.695	96,45%
7.	BBPSDMP Medan	15.817.777.000	15.817.777.000	15.056.554.641	761.222.359	95,19%
8.	BBPSDMP Makassar	13.725.587.000	14.471.531.000	14.179.254.558	292.276.442	97,98%
9.	BPSDMP Jakarta	7.199.051.000	7.199.051.000	6.797.722.872	401.328.128	94,43%
10.	BPSDMP Bandung	7.474.844.000	7.474.844.000	7.382.669.634	92.174.366	98,77%
11.	BPSDMP Yogyakarta	9.284.975.000	9.284.975.000	8.419.780.126	865.194.874	90,68%
12.	BPSDMP Surabaya	9.706.694.000	9.706.694.000	9.541.674.627	165.019.373	98,30%
13.	BPSDMP Banjarmasin	6.456.318.000	6.456.318.000	5.833.138.363	623.179.637	90,35%
14.	BPSDMP Manado	7.019.967.000	7.160.813.000	6.963.344.280	197.468.720	97,24%
15.	BPPTIK Cikarang	15.525.595.000	21.046.214.000	20.205.612.204	840.601.796	96,01%
16.	BPPTIK Ciputat	2.889.305.000	2.829.305.000	2.505.137.350	324.167.650	88,54%
TOTAL		263.470.629.000	385.488.751.000	354.473.239.980	31.015.511.020	91,95%

Apabila dibandingkan, berikut kinerja anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2015-2019 :

Tabel 3.19
Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2015 s.d 2019

Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Awal (Rp)	199.752.100.000	197.134.880.000	261.466.700.000	220.358.878.000	263.470.629.000
Pagu Revisi (Rp)	272.071.383.000	193.132.363.000	246.005.068.000	223.414.117.000	385.488.751.000
Realisasi (Rp)	240.825.191.629	177.338.522.514	234.963.182.466	212.708.473.582	354.473.239.980
Realisasi (%)	88,52	91,82	95,51	95,21	91,95

Gambar 3.7
Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2015 s.d 2019



Realisasi penggunaan anggaran Badan Litbang SDM adalah sebesar 91,95%. Kinerja anggaran tersebut belum optimal dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. PNBPN tidak terealisasi dengan maksimal disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Alokasi anggaran PNBPN senilai Rp 10 M yang berasal dari Ditjen PPI tidak jadi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program DTS karena MP baru dapat dicairkan bulan Desember.
 - 2) Pengiriman MP terakhir dari Ditjen SDPPI senilai Rp 8 M tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena baru dapat dicairkan pada bulan Desember
2. Sebagian besar jadwal pelaksanaan kegiatan - kegiatan DTS mengalami keterlambatan dari jadwal semula dikarenakan anggaran yang bersumber dari PNBPN baru dapat dicairkan di bulan Mei.
3. Pembayaran ke mitra perguruan tinggi lebih kecil daripada pagu yang dialokasikan, disebabkan beberapa hal di antaranya:
 - Kuota peserta tidak terpenuhi
 - Terdapat beberapa ruang lingkup pekerjaan yang tidak jadi terlaksana sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran

4. Peningkatan kapasitas dan ruang lingkup pekerjaan program DTS tahun 2019 sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018. Program ini melibatkan lebih banyak mitra dan skema pelaksanaan yang beragam sehingga banyak komponen pekerjaan baru yang muncul atau bahkan batal dilaksanakan sehingga mempengaruhi besaran alokasi pembiayaan.
5. Peserta yang berhak untuk diikutsertakan dalam program sertifikasi lanjutan (global) tidak terpenuhi kuotanya dikarenakan sebagian peserta tidak mampu memenuhi syarat minimal nilai yang dibutuhkan untuk diikutkan dalam sertifikasi lanjutan (global). Hal ini menyebabkan anggaran yang semula dialokasikan untuk peserta sertifikasi lanjutan tidak dapat terealisasi secara optimal.

Secara umum kinerja dan capaian kinerja Badan Litbang SDM tahun 2019 yang dihasilkan telah diimplementasikan secara maksimal dan dilaksanakan secara optimal. Namun demikian masih tetap diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada T-1 atau selambat-lambatnya di awal tahun berjalan;
2. Mengantisipasi pencairan dana program/kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN unit kerja Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI dengan kemungkinan baru akan dapat dicairkan pada pertengahan tahun; dan
3. Mengantisipasi skema baru program DTS dengan menyesuaikan dengan kondisi anggaran *existing*.






PENUTUP



Badan Litbang SDM telah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika melalui program kerja Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Badan Litbang SDM, Rencana Kerja Pemerintah, Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2019.

Secara keseluruhan Badan Litbang SDM telah menghasilkan kinerja yang baik. Dimana dari 3 (tiga) sasaran program dengan 9 (Sembilan) Indikator, Badan Litbang SDM berhasil meraih capaian 7 (tujuh) IKSP atau sekitar 77% IKSP yang pencapaiannya melebihi target (>100%). Beberapa capaian kinerja Badan Litbang SDM yaitu sebagai berikut :

1. Dari 9 (Sembilan) IKSP yang telah ditetapkan. sebanyak 7 (tujuh) IKSP atau sekitar 77% IKSP yang pencapaiannya melebihi target (>100%). Sementara 2 (dua) IKSP atau sekitar 22% IKSP belum mencapai target (<100%).
2. 7 (tujuh) IKSP yang pencapaiannya melebihi target dari yang ditetapkan (>100%) adalah :
 - 1) Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI dari target 70%, realisasinya mencapai 82% dengan prosentase 117%;
 - 2) Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis dari target 90%, realisasinya mencapai 99% sehingga prosentasenya adalah 110%;
 - 3) Persentase (%) Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan, dari target semula 60% Penelitian dinilai Bermanfaat menjadi 100% dinilai Bermanfaat oleh *stakeholder* sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar 166%;
 - 4) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM yang semula ditargetkan ≥ 76 namun berhasil meraih hingga 90.5 sehingga prosentase capaiannya adalah 119%;
 - 5) Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM yang semula ditargetkan ≥ 67 ternyata mampu meraih nilai 73,73 sehingga prosentase capaiannya mencapai 110%;
 - 6) Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018 dengan polarisasi Minimize yang semula ditargetkan $< 1\%$, ternyata temuan hanya sebesar 0.08% dari total pagu tahun anggaran 2018 sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar 125%; dan
 - 7) Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM yang semula ditargetkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal 80% pada tahun berjalan dan 40% pada tahun sebelumnya ternyata Badan Litbang SDM mampu menyelesaikan hingga 100% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal pada tahun berjalan dan 100% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal pada tahun sebelumnya.
3. 2 (dua) IKSP yang pencapaiannya belum mencapai target (<100%) adalah:
 - 1) Persentase (%) Peserta *Digital Talent Scholarship* dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri yang semula ditargetkan 20% alumni peserta FGA dan VSGA tersertifikasi mampu terserap industry, pada pelaksanaan mengalami hambatan



dimana alumni tidak 100% memberikan feedback kuesioner sehingga tidak seluruh alumni dapat teridentifikasi status pekerjaannya setelah mengikuti pelatihan. Maka IKSP ini hanya dapat mengidentifikasi 19,05% alumni peserta FGA dan VSGA tersertifikasi mampu terserap industry sehingga prosentase capaiannya adalah 95%;

- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Litbang SDM yang semula ditargetkan ≥ 94 , pada pelaksanaannya Badan Litbang SDM meraih nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,59% sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar 99%.

Badan Litbang SDM perlu mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan performa kinerja, di antaranya melalui pematangan perencanaan program dan penyusunan anggaran dan kegiatan serta agenda kegiatan yang lebih optimal dan efisien. Koordinasi yang lebih intensif dengan satuan kerja di Kementerian Kominfo terutama dalam menentukan gagasan dan topik penelitian yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan pola pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis serta perubahan *mindset* dan etos kerja SDM di lingkungan Badan Litbang SDM. Identifikasi dan mitigasi risiko juga perlu diidentifikasi pada proses perencanaan suatu program agar tidak terjadi *trial and error* ketika pelaksanaan.





LAMPIRAN



Lampiran1 Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektifm transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basuki Yusuf Iskandar

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015 - 2019 dan Renstra 2015 - 2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2019

Pihak Kedua,



Rudiantara

Pihak Pertama,



Basuki Yusuf Iskandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
(RP JMN 2015-2019 DAN RENSTRA 2015-2019)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Persentase (%) Peserta Digital Talent Scholarship dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	20%
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI	70%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN Kementerian Kominfo yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis	90%
2.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Hasil Penelitian dan Dimanfaatkan untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dari Total Penelitian yang Dihasilkan	60%
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2019 Badan Litbang SDM	≥ 76
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Tahun 2019 Badan Litbang SDM	≥ 67
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2018 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2018	≤ 1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal Badan Litbang SDM	a. Thn. Berjalan: 80% b. Thn. Sebelumnya: 40%
		5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Badan Litbang SDM	≥ 94

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi BBPSDMP	Rp.	29.543.364.000,-
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi BBPSDMP	Rp.	47.141.849.000,-
3.	Penyelenggaraan Tri Dharna Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta	Rp.	51.614.792.000,-
4.	Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	5.120.000.000,-
5.	Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp.	17.179.037.000,-

Kegiatan	Anggaran
6. Pengembangan Profesi dan Sertifikasi bidang Kominfo	Rp. 133.741.025.000,-
7. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Rp. 4.520.000.000,-
8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	Rp. 74.790.195.000,-
9. Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 9.184.9000.000,-

Jakarta, Juli 2019

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Rudiantara

Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



Basuki Yusuf Iskandar

Kontak :

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat 10110
Telp. +62 21 381 0678
Fax. +62 21 381 0678
<http://balitbangsdm.kominfo.go.id>